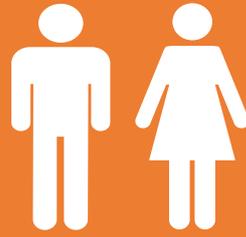




PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA



DATA TERPILAH GENDER & ANAK

KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

2019

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	Iv
DAFTAR GAMBAR	vI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Manfaat.....	10
1.5 Sistematika Dokumen.....	10
BAB II PERSPEKTIF TEORI	12
2.1 Gender	12
2.2 Pengarusutamaan Gender	14
2.3 Kesetaraan dan Keadilan Gender	17
2.4 Data Terpilah.....	21
2.5 Indikator Gender	22
BAB III KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	24
3.1 Pengarustamaan Gender (PUG)	24
3.2 Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	25
BAB IV KONDISI UMUM DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	27
4.1 Gambaran Geografis dan Demografis	27
4.2 Gambaran Perekonomian Makro	Error! Bookmark not defined.
4.3 Gambaran Kemiskinan.....	Error! Bookmark not defined.
4.4 Gambaran Kualitas Sumber Daya Manusia	35
BAB V PROFIL GENDER DI BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	52
5.1 Angka Harapan Hidup	52
5.2 Angka Kematian dan Penyebab Kematian Ibu Melahirkan	54
5.3 Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan.....	55
5.4 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas.....	56
5.5 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas.....	57
5.6 Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe 1 dan Fe 3)....	Error! Bookmark not defined.

5.7	Kasus Aborsi pada Remaja Putri.....	58
5.8	Kasus HIV/AIDS	59
5.9	Pengguna NAPZA.....	60
5.10	Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia	61
5.11	Status Kesehatan Penduduk	62
5.12	Akses ke Pelayanan Kesehatan	63
5.13	Keluarga Berencana	64
BAB VI PROFIL GENDER DI BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
		66
6.1	Status Pendidikan dan Buta Huruf.....	66
6.2	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	67
6.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	68
6.4	Angka Partisipasi Murni (APM)	69
6.5	Angka Partisipasi Kasar (APK).....	70
6.6	Angka Putus Sekolah (APTs).....	71
6.7	Angka Kelulusan (AL).....	72
6.8	Angka Melanjutkan Sekolah (AMS).....	72
6.9	Tenaga Kependidikan.....	73
6.10	Pendidikan Kesetaraan	74
6.11	Rata-Rata Lama Sekolah	75
6.12	Harapan Lama Sekolah.....	76
6.13	Akses Terhadap Informasi dan Teknologi	Error! Bookmark not defined.
BAB VII PROFIL GENDER DI BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
		78
7.1	Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja	78
7.2	Pekerja Anak	80
7.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	81
7.4	Pengangguran	82
7.5	Pencari Kerja	83
7.6	Serikat Pekerja	84
7.7	Pekerja Peserta Jamsostek (K3).....	85
7.8	Koperasi dan Pelaku Usaha.....	86
7.9	Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial	87
BAB VIII PROFIL GENDER DI BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.....		
		89
8.1	Partisipasi di Bidang Politik	89
8.2	Partisipasi di Bidang Eksekutif.....	90
8.3	Partisipasi di Bidang Yudikatif	92
BAB IX PROFIL GENDER DI BIDANG SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
		94
9.1	Program Perlindungan Sosial	94

9.2	Jaminan Sosial.....	95
9.3	Penguhi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	95
BAB X PROFIL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		97
BAB XI PROFIL TUMBUH KEMBANG ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		98
11.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	98
11.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	99
11.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	99
11.4	Angka Partisipasi Murni (APM)	100
BAB XII PENUTUP		102
12.1	Kesimpulan.....	102
12.1	Rekomendasi	102

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabuapet Kutai Kartanegara	28
Tabel 4.2	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010, 2016, dan 2017	29
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2018.....	31
Tabel 4.4	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2017-2018.....	35
Tabel 4.5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017 (Milliar Rupiah)	39
Tabel 4.6	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017 (Milliar Rupiah)	41
Tabel 4.7	Perkembangan Indikator Komposit IPG Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	61
Tabel 4.8	Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	63
Tabel 4.9	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	
Tabel 4.10	Jumlah Kematian Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	66
Tabel 4.11	Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019	73
Tabel 4.12	Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2018	74
Tabel 4.13	Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2018	75
Tabel 4.14	Prosentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun menurut Karakteristik, Tempat Rawat Inap, dan Rata-Rata Lama Rawat Inap Tahun 2017	76
Tabel 4.15	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	77
Tabel 4.16	Prosentase Penduduk Umum 0-59 Bulan (Balita) yang Memiliki Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	79
Tabel 4.17	Prosentase Penduduk Berumur 5 Tahun menurut Status Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	83

Tabel 4.18	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	85
Tabel 4.19	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	86
Tabel 4.20	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	86
Tabel 4.21	Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	90
Tabel 4.22	Akses Terhadap Informasi dan Teknologi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	94
Tabel 4.23	Prosentase Penduduk Berumur 5 Tahun menurut Status Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	96
Tabel 4.24	Jumlah Pekerja berdasarkan Sektor Pekerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018	97
Tabel 4.25	Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2018	101
Tabel 4.26	Jumlah Pelaku Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018	105
Tabel 4.27	Jumlah Pengurus Harian Partai di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018	108
Tabel 4.28	Jumlah PNS menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	109
Tabel 4.29	Jumlah Jaksa, Pegawai Kejaksaan, Hakim dan Jumlah Panitera Pengganti di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	111
Tabel 4.30	Prosentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	112
Tabel 4.31	Prosentase Rumah Tangga menurut Jenis Jaminan Sosial yang Diterima di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	113
Tabel 4.32	Jenis Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	115
Tabel 4.33	Jenis Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	115
Tabel 4.34	Jenis Pendidikan, Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Kabupaten Kutai Kartanegara	27
Gambar 4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018.....	29
Gambar 4.3	Prosentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kutai Kartanegara Tahun 2018	31
Gambar 4.4	Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara	33
Gambar 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	34
Gambar 4.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2013-2017	36
Gambar 4.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017	36
Gambar 4.8	Pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017 (Milliar)	37
Gambar 4.9	Posisi Relatif PDRB ADHB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017 (Milliar)	38
Gambar 4.10	Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017 (Milliar)	40
Gambar 4.11	Posisi Relatif PDRB ADHK Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017 (Milliar)	41
Gambar 4.12	Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2016 (Juta)	42
Gambar 4.13	Posisi Relatif PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 (Juta)	44
Gambar 4.14	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2018	45
Gambar 4.15	Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018	45
Gambar 4.16	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2018	46
Gambar 4.17	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018	47
Gambar 4.18	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2018	47
Gambar 4.19	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018	48
Gambar 4.20	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2018	49
Gambar 4.21	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018	49

Gambar 4.22	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2018	50
Gambar 4.23	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018	51
Gambar 4.24	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	52
Gambar 4.25	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018	52
Gambar 4.26	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	53
Gambar 4.27	Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018	54
Gambar 4.28	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	55
Gambar 4.29	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018	55
Gambar 4.30	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	56
Gambar 4.31	Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018	57
Gambar 4.32	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	58
Gambar 4.33	Posisi Relatif Pengeluaran Perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 (ribu)	58
Gambar 4.34	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	59
Gambar 4.35	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	60
Gambar 4.36	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	62
Gambar 4.37	Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	62
Gambar 4.38	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	65
Gambar 4.39	Perkembangan Angka Harapan Hidup berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	65
Gambar 4.40	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019	67
Gambar 4.41	Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2019	68
Gambar 4.42	Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2019	69
Gambar 4.43	Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2019	70
Gambar 4.44	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe 1 dan Fe 3) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	71
Gambar 4.45	Kasus Aborsi pada Remaja Putri di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019	72

Gambar 4.46	Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lama Sakit Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	76
Gambar 4.47	Penggunaan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Rawat Jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	78
Gambar 4.48	Prosentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dan Penolong Persalinan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	78
Gambar 4.49	Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2019	80
Gambar 4.50	Prosentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB dan Jenis Alat/Cara di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	81
Gambar 4.51	Prosentase Penduduk 15 Tahun ke Atas dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	82
Gambar 4.52	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	84
Gambar 4.53	Angka Putus Sekolah (APTs) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	87
Gambar 4.54	Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	88
Gambar 4.55	Angka Melanjutkan Sekolah (AMS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	89
Gambar 4.56	Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	90
Gambar 4.57	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	91
Gambar 4.58	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	92
Gambar 4.59	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	93
Gambar 4.60	Perkembangan Harapan Lama Sekolah berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	93
Gambar 4.61	Jumlah Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	96
Gambar 4.62	Perkembangan TPAK berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	98
Gambar 4.63	Perkembangan TPAK berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	99
Gambar 4.64	Perkembangan TPT berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018	100
Gambar 4.65	Prosentase Pencari Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2018	101
Gambar 4.66	Jumlah Anggota Serikat Pekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2018	103

Gambar 4.67	Jumlah Pekerja yang Mengikuti Jamsostek (K3) Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2018	104
Gambar 4.68	Jumlah Anggota Koperasi Aktif di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2016	105
Gambar 4.69	Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2013-2017	106
Gambar 4.70	Jumlah Anggota DPRD di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018	107
Gambar 4.71	Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	109
Gambar 4.72	Jumlah PNS menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	110
Gambar 4.73	Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2014-2018	114
Gambar 4.74	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	117
Gambar 4.75	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	118
Gambar 4.76	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara yang tengah berkembang tidak hentinya terus melakukan upaya pembangunan guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya. Berbagai upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak pendukung pada hakikatnya ditunjukkan untuk kepentingan seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa "Segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal tersebut menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjamin kedudukan warga negara dimata hukum dan pemerintahan yang non diskriminasi, untuk seluruh rakyat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

Meskipun demikian, pada proses perkembangannya realisasi dari komitmen tersebut masih menimbulkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender kemudian masih terlihat di berbagai dimensi kehidupan dan kemudian lebih banyak dialami oleh perempuan. Keprihatinan negara-negara di dunia terkait dengan ketidakadilan gender kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk komitmen, deklarasi maupun konvensi dan telah tercatat dalam sejarah.

Komitmen yang diwujudkan dalam meratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958, meskipun pada Pemilihan Umum Tahun 1955 perempuan di Indonesia telah memiliki dan menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum. Kemudian dilanjutkan dengan Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kebijakan tentang pentingnya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender

dalam pembangunan nasional diawali melalui proses kesepakatan global secara konkrit pada Konferensi Perempuan Sedunia ke IV yang diselenggarakan di Beijing, China pada tahun 1995.

Hasil dari Konferensi yang dikenal sebagai Kerangka Aksi Beijing (*Beijing Platform for Action/BPFA*) menerapkan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan secara nasional untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Berdasarkan Kerangka Aksi Beijing (*Beijing Platform for Action*) berfokus 12 bidang kritis yang erat kaitannya permasalahan dan ketertinggalan kaum perempuan dalam pembangunan meliputi:

1. Perempuan dan Kemiskinan;
2. Perempuan dan Pendidikan;
3. Perempuan dan Kesehatan;
4. Kekerasan terhadap Perempuan;
5. Perempuan dan Ekonomi;
6. Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan;
7. Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan;
8. Hak-hak Azasi untuk Perempuan);
9. Perempuan dan Media Massa;
10. Perempuan dan Lingkungan Hidup;
11. Anak Perempuan; dan
12. Perempuan dan Konflik Bersenjata (Sumber BPFA, 1995).

Komitmen Pemerintah diwujudkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai bentuk strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan serta pembangunan. Dalam Inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender.

Perspektif gender pada dasarnya tidak hanya berfokus pada perempuan saja akan tetapi juga menyangkut persoalan anak. Anak sebagai generasi muda penerus cita-cita dan perjuangan bangsa, pada dasarnya memiliki peran strategis dan memiliki ciri serta sifat khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU No. 35 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan bentuk dari hasil ratifikasi Convention on the Right of the Child (CRC). Sehingga, Konvensi ini merupakan instrument internasional di bidang Hak Azasi manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif.

Pada tahun 2008 dikeluarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan kemudian direvisi dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan tersebut menginstruksikan semua perangkat daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan dan penganggaran setiap tahun. Berdasarkan Permendagri tersebut, ditegaskan tentang penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus responsif gender, baik dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan rencana kerja tahunan PD.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut sistem perencanaan pembangunan dibutuhkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 2004 pasal 31. Akan tetapi ketersediaan data masih menjadi persoalan yang paling krusial dalam mekanisme perencanaan penganggaran. Data gender dan anak bahkan mengalami problem serius yang kadangkala tidak dapat disediakan dengan baik, dengan berbagai alasan yang sulit diterima. Kesulitan yang selalu mengemuka adalah pencatatan yang tidak pernah terlaksana, dan kebiasaan untuk menyandarkan harapan kepada BPS sebagai penyedia data. Sementara itu belum disadari sepenuhnya bahwa tidak semua urusan memiliki data yang tercover oleh BPS.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah mengamanatkan berbagai dokumen perencanaan penganggaran yang harus disusun berbasis data. Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpisah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki, sehingga secara jelas dapat dirumuskan kesenjangan yang harus diselesaikan. Oleh karenanya data berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur menjadi inti dalam menghasilkan profil data gender baik secara kuantitatif maupun kualitatif, baik terpisah maupun insiden khusus yang berguna dalam mengidentifikasi isu gender termasuk didalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender.

Data gender dan anak merupakan elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak

anak. Data gender dan anak akan memberikan sumbangan besar bagi perumusan isu gender yang pada akhirnya akan berkontribusi bagi penyelenggaraan kegiatan yang responsif gender.

Seperti diketahui bersama isu gender selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah maupun data insiden khusus kurang memadai. Persoalan ini makin berantai manakala penyedia data pembangunan selama ini kurang memperhatikan pentingnya data terpilah sebagai dasar penyelenggaraan perencanaan penganggaran. Beberapa penyebab yang teridentifikasi adalah kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraan data gender, kapasitas SDM yang belum optimal serta sarana prasarana sebagai penunjang utama ketersediaan data yang masih terbatas.

Kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang tidak mendasarkan pada data gender berakibat pada rendahnya tingkat responsivitas terhadap kebutuhan, kesulitan menempatkan sasaran baik sebagai perempuan dan/atau sebagai laki-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak. Dampak yang lebih luas adalah ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan terus berlanjut.

Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan sebuah peraturan tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA No. 6 Tahun 2009 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri PPPA No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Pasal 4 dalam Peraturan Menteri tersebut menyatakan tujuan dari penyelenggaraan data gender dan anak adalah: (1) memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir; (2) membangun atau memperkuat

mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah; dan (3) meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di kementerian/lembaga dan daerah. Selanjutnya pasal 5 Menteri memerintahkan kepada kementerian/lembaga dan daerah melakukan penyelenggaraan sistem data gender dan anak.

Dalam mendukung hal tersebut, perlu disusun satu dokumen Data Terpilah Gender dan Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbasis teknologi informasi yang mampu membantu perencana dalam mengintegrasikan data pilah gender ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 22. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 71);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 86);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 94).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk memberikan informasi data gender dan anak bagi perencanaan penganggaran perangkat daerah, perguruan tinggi/akademisi, pihak eksternal/pihak-pihak lain yang membutuhkan data guna perkembangan kemajuan gender.

Tujuan dari penyusunan dokumen Data Terpilah Gender dan Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Tersedianya data terpilah yang dapat menggambarkan kondisi gender dan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Tersedianya kesimpulan dan rekomendasi atas kondisi gender dan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penyusunan dokumen Data Terpilah Gender dan Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah sebagai sumber informasi dan gambaran isu gender maupun isu anak yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memberikan masukan bahan kebijakan perencanaan pembangunan yang responsif gender bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.5 Sistematika Dokumen

Sistematika Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta manfaat penyusunan dokumen data terpilah gender dan anak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- BAB II. PERPEKSTIF TEORI, berisi mengenai teori-teori tentang gender, pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender, data terpilah dan indikator gender.
- BAB III. KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK, berisi mengenai kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dan

perlindungan anak dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV. KONDISI UMUM DAERAH, berisi mengenai gambaran geografis dan demografis, perekonomian makro, kemiskinan, dan kualitas sumber daya manusia.

BAB V. PROFIL GENDER DAN ANAK DI BIDANG KESEHATAN, berisi mengenai gambaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VI. PROFIL GENDER DAN ANAK DI BIDANG PENDIDIKAN, berisi mengenai gambaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VII. PROFIL GENDER DAN ANAK DI BIDANG KETENAGAKERJAAN, berisi mengenai gambaran pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VIII. PROFIL GENDER DAN ANAK DI BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN, berisi mengenai gambaran pembangunan bidang politik dan pengambilan keputusan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IX. PROFIL GENDER DAN ANAK DI BIDANG SOSIAL, berisi mengenai gambaran pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB X. PROFIL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, berisi mengenai gambaran jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB XI. PROFIL TUMBUH KEMBANG ANAK, berisi mengenai gambaran aksesibilitas pendidikan bagi anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB XII. PENUTUP, berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PERSPEKTIF TEORI

2.1 Gender

Pengertian gender dengan penafsiran berbeda-beda kerap menimbulkan respon yang tidak proporsional. Secara etimologis, kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang secara harfiah "gender" berarti jenis kelamin¹. Kamus Inggris Indonesia, kata Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat². Dalam Webster's New World Dictionary, Edisi 1984 'gender' diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku'. Sementara itu dalam *Concise Oxford Dictionary of Current English* Edisi 1990, kata 'gender' diartikan sebagai penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan 3 dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin (atau kenetralan).

Mengacu pada pendapat Mansour Faqih, Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas. Masih dalam buku yang sama,

¹ John M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, cet XII, 1983), h.265

² Helen Tierney (ed), Women's Studies Encyclopedia, Vol 1, New York: Green Wood Press, h.153

Mansour faqih mengungkapkan bahwa sejarah perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan Gender terbentuk oleh banyak hal yang disosialisasikan, diajarkan, yang kemudian diperkuat dengan mengkonstruksinya baik secara sosial maupun kultural. Melalui proses panjang tersebut pada akhirnya diyakini sebagai sesuatu yang kodrati baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan, hal ini kemudian direfleksikan sebagai sesuatu yang dianggap alami dan menjadi identitas gender yang baku. Identitas gender adalah definisi seseorang tentang dirinya, sebagai laki-laki atau perempuan, yang merupakan interaksi kompleks antara kondisi biologis dan berbagai karakteristik perilaku yang dikembangkan sebagai hasil proses sosialisasi³. Pengertian gender yang lebih kongkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasarudin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial⁴.

Lebih lanjut Nasarudin Umar menjelaskan bahwa penentuan peran gender dalam berbagai sistem masyarakat, kebanyakan merujuk kepada tinjauan biologis atau jenis kelamin. Masyarakat selalu berlandaskan pada diferensiasi spesies antara laki-laki dan perempuan. Organ tubuh yang dimiliki oleh perempuan sangat berperan pada pertumbuhan kematangan emosional dan berpikirnya. Perempuan cenderung tingkat emosionalnya agak lambat. Sementara laki-laki yang mampu memproduksi dalam dirinya hormon testosterone membuat ia lebih agresif dan lebih obyektif.

Istilah gender menurut Oakley (1972) berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut Caplan (1987) menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dalam ilmu sosial

³ Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 8-9

⁴ Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, Jakarta : Paramadina, 2001,h.35

diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing (Zainuddin, 2006: 1).

Menurut para ahli lainnya seperti Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). H. T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Linda L. Lindsey menganggap bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*). Elaine Showalter menegaskan bahwa gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya (Nasaruddin Umar, 2010: 30).

Dari pengertian gender menurut para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama merupakan hasil belajar seseorang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan.

2.2 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi

integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan.

Pelaksanaan PUG berdasarkan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Menurut Inpres tersebut, Kementrian dan lembaga ditingkat nasional dan lokal harus mengatasi persoalan ketidak-setaraan gender dan menghapuskan dikriminasi gender.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Permendagri 67 Tahun 2011, Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Pengarusutamaan gender mengalami perkembangan secara bertahap dari kesepakatan internasional menjadi kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah pusat, hingga menjadi kebijakan pembangunan pada semua lini pemerintahan dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota.

Istilah tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB melalui *The Jakarta Plan of Action (JPA) for The Advancement of Women in Asia and Pacific* pada bulan Juni 1994 yang kemudian diadopsi dalam pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik II mengenai Wanita Dalam Pembangunan⁵. Istilah PUG muncul dalam sebuah rencana aksi yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kebijakan dan

⁵Biro perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Diakses melalui <http://www.rocankeu.depkeu.go.id/www/web-datacontent-baca.asp.28.html> pada tanggal 27 Mei 2015.

program yang mengandung pengarusutamaan gender (*mainstreaming gender concern public policy and program*). Diseminasi tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB dalam Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi yang dihadiri oleh Negara-negara anggota PBB tersebut menetapkan rekomendasi terkait dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang disebut sebagai *Beijing Declaration and Platform for Action* atau Deklarasi Beijing dan Kerangka Tindak. Pemikiran ini didasari oleh fenomena yang terjadi secara global tentang kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan yaitu masih belum terintegrasikannya pendekatan sensitive gender (masih bias gender) sehingga rentan menimbulkan permasalahan gender dalam implementasinya.

Deklarasi Beijing mengangkat beberapa isu global yang saat itu terjadi hampir diseluruh belahan dunia. Beberapa isu yang diangkat dalam penyusunan Deklarasi Beijing⁶, adalah:

- 1) Perempuan dan Kemiskinan,
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Perempuan,
- 3) Perempuan dan Kesehatan,
- 4) Kekerasan Terhadap Perempuan,
- 5) Perempuan dan Konflik Bersenjata,
- 6) Perempuan dan Ekonomi,
- 7) Perempuan dan Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan,
- 8) Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan,
- 9) Hak Asasi Perempuan,
- 10) Perempuan dan Media,
- 11) Perempuan dan Lingkungan Hidup, serta
- 12) Anak Perempuan.

Deklarasi Beijing mendapatkan respon yang cukup positif baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan mengintegrasikan PUG kedalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Tahun 1999-2004. Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada jajaran

⁶Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012. 2012.

pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Pada tahun 2000 sebanyak 189 negara anggota PBB menyepakati tentang sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disebut dengan Millenium Development Goals (MDGs). Dokumen ini berisi tentang komitmen masing-masing Negara dalam mengentaskan 8 permasalahan yang menjadi focus dalam MDGs, yang salah satunya adalah Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (tujuan ke 3). Tujuan ketiga MDGs tersebut memiliki target mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

Meskipun telah dikumandangkan dalam waktu yang relatif lama, tindak lanjut terhadap pelaksanaan PUG di daerah masih belum memiliki prestasi yang signifikan. Sejak diterbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan dilanjutkan dengan Kepmendagri 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah, pemerintah daerah masih belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan PUG di daerah. Pergerakan terhadap pelaksanaan PUG ditunjukkan sejak diterbitkannya Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Permendagri 15 Tahun 2008 dan Peremendagri 67 Tahun 2011 mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan PUG kedalam dokumen perencanaan daerah meliputi, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD.

2.3 Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan Gender diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,

ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Permendagri 15 tahun 2008). Kesetaraan gender mengacu pada tujuan agar perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dalam hal keberadaan mereka di berbagai bidang pembangunan, diantaranya untuk: (1) Berpartisipasi mencapai haknya mengambil keputusan di dalam rumah maupun di ruang publik; (2) Memberi kontribusi pada ranah politik, ekonomi, dan sosial, dan (3) Menikmati manfaat partisipasinya.

Saat ini konsep kesetaraan gender mengacu pada upaya memberikan kondisi yang adil bagi perempuan dan memberikan perlakuan yang adil seperti bila mereka pada status yang sama. Kesetaraan gender berarti mengakui perbedaan perempuan dan laki-laki dan perbedaan peran mereka di masyarakat. Oleh karenanya, kesetaraan gender menggarisbawahi bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki seharusnya tidak memberi dampak negatif pada kehidupan mereka. Bahkan mereka dapat untuk saling berbagi dan bertukar peran dan kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender berbasis pada upaya menjawab persoalan ketidakadilan perempuan dan laki-laki, tidak terbatas pada penetapan angka quota keterwakilan semata, seperti yang dibayangkan banyak orang.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

(1) Akses

Aspek akses merupakan peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi anak didik adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk anak didik perempuan dan laki-laki diberikan secara adil dan setara atau tidak.

(2) Partisipasi

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di tempat yang sama atau tidak.

(3) Kontrol

Aspek kontrol merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan tertentu sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.

(4) Manfaat

Aspek manfaat merupakan kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan (Permendagri 15 tahun 2008). Keadilan gender dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, ketidakadilan atau diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki akibat dari sistem dan struktur sosial yang berlaku di masyarakat. Ketidakadilan gender ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk. Ketidakadilan gender ini tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga banyak dialami oleh laki-laki.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Ketidakadilan gender (gender inequalities) merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender menurut beberapa pakar timbul dalam bentuk:

(1) Stereotype

Pelabelan atau penandaan yang seringkali bersifat negatif secara umum dan melahirkan ketidakadilan. Sebagai contoh, perempuan sering digambarkan emosional, lemah, cengeng, tidak rasional, dan sebagainya. Stereotype tersebut yang kemudian menjadikan perempuan selama ini ditempatkan pada posisi domestik, kerap kali perempuan di identikan dengan urusan masak, mencuci, dan seks (dapur, sumur, dan kasur).

(2) Kekerasan (Violence)

Kekerasan berbasis gender, kekerasan tersebut terjadi akibat dari ketidak seimbangan posisi tawar (bargaining position) atau kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi peran yang telah mendarah daging pada budaya patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Cakupan kekerasan ini cukup luas, diantaranya eksploitasi seksual, pengabaian hak-hak reproduksi, trafficking, perkosaan, pornografi, dan sebagainya.

(3) Marginalisasi

Peminggiran terhadap kaum perempuan terjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan, atau pengetahuan (Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.14). Salah satu bentuk paling nyata dari marginalisasi ini adalah lemahnya peluang perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi. Proses tersebut mengakibatkan perempuan menjadi kelompok miskin karena peminggiran terjadi secara sistematis dalam masyarakat.

(4) Subordinasi

Penomorduaan (subordinasi) ini pada dasarnya merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya (Leli Nurohmah dkk, Kesetaraan Kemajemukan dan Ham, Jakarta: Rahima, h. 13). Hal ini berakibat pada kurang diakuinya potensi perempuan sehingga sulit mengakses posisi-posisi strategis dalam komunitasnya terutama terkait dengan pengambilan kebijakan.

(5) Beban Kerja Lebih Panjang Dan Lebih Banyak (Double Burden)

Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan (Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h.21). Untuk keluarga miskin perempuan selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, mereka juga mencari nafkah sebagai sumber mata pencarian tambahan keluarga, ini menjadikan perempuan harus bekerja ekstra untuk mengerjakan kedua bebannya.

2.4 Data Terpilah

Data adalah kumpulan nilai variabel yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Data dapat digunakan untuk menilai tentang sebuah kondisi berdasarkan nilai yang dihasilkan oleh data tersebut, tidak terkecuali tentang kondisi pembangunan gender. Kondisi tentang ketimpangan ataupun kesetaraan dan keadilan gender dapat dianalisis dan dinilai melalui sebuah data terpilah atau disebut dengan data gender. Data gender, berdasarkan jenisnya, dapat diklasifikasi kedalam dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data gender yang dinominasikan dalam sebuah satuan yang rigid, dihasilkan

melalui sebuah formula perhitungan, serta bernominasikan angka disebut dengan data kuantitatif. Adapun data yang bersifat keterangan atau pendapat yang menggambarkan tentang sebuah kondisi ketimpangan atau kesetaraan dan keadilan gender disebut dengan data kualitatif.

Penyediaan data, analisis dan pelaporan terpisah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus perempuan dan laki-laki. Data terpisah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Profil Gender yaitu informasi yang mengandung isu gender sebagai hasil dari analisis gender. Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) diberbagai urusan pembangunan. Sumber data pilah dapat berasal dari Hasil studi baseline (idealnya harus dilakukan studi baseline sebelum kebijakan/program/kegiatan dimulai) maupun hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal K/L/SKPD tentang intervensi, baik yang sudah dan/atau yang sedang dilakukan.

Data pilah berdasarkan fungsinya terbagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesetaraan gender yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan terhadap akses, partisipasi, manfaat, kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan;
2. Merupakan data yang dibedakan menurut isu siklus kehidupan masyarakat menurut jenis kelamin dan kelompok usia baik usia anak, usia remaja, usia dewasa/produktif dan lansia secara spasial (kewilayahan), kelompok masyarakat dan statifikasi sosial ekonomi.
3. Merupakan data insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin.

2.5 Indikator Gender

Kebutuhan penggambaran data gender dan anak-pun tidak mungkin dibatasi hanya yang terkait dengan kewenangan urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, namun juga amanat lainya atau yang muncul setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah diundangkan, antara lain adalah : CEDAW, Beijing Platform for Action 1995, Konvensi Hak Anak (KHA), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Indikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk urusan PPPA, serta indikator lainnya yang masih relevan.

BAB III

KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

3.1 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan maupun program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan maupun permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Pemerintah telah menyatakan keberpihakannya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dengan mengeluarkan kebijakan pengarusutamaan gender pada semua program kerjanya (Inpres No. 9 Tahun 2000).

Pengarusutamaan Gender (PUG) pada dasarnya merupakan salah satu strategi maupun intervensi pada berbagai kebijakan sehingga dapat responsif gender. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Keadilan ataupun kesetaraan gender didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki kondisi yang setara dan seimbang dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) saat ini telah diinstruksikan kepada seluruh departemen maupun lembaga pemerintah dan non departemen di pemerintah baik nasional, provinsi maupun di tingkat kabupen/kota. Bentuk PUG yang diinstruksikan salah satunya adalah dengan melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program/proyek dan kegiatan.

3.2 Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Permasalahan terkait dengan gender pada dasarnya menimpa baik laki-laki maupun perempuan. Namun, pada kenyataannya kasus ketidakadilan yang terjadi seringkali menimpa perempuan dan anak-anak. Ketidakadilan tersebut mulanya muncul akibat dari hubungan gender yang timpang sehingga kemudian menyebabkan ketimpangan salah satu pihak dalam memperoleh akses, manfaat maupun dalam hal keikutsertaan serta penugasan yang biasanya dapat terjadi baik di rumah, tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat. Beberapa bentuk dari ketidakadilan gender diantaranya adalah subordinasi, marjinalisasi, beban ganda, kekerasan, maupun pelabelan (stereotype) turut mewarnai kehidupan masyarakat saat ini. Sehingga, dalam mengatasi hal tersebut perlu adanya komitmen untuk melembagakan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Beberapa prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan, antara lain :

1. Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi yang fokus dan efektif; bukan sebagai pengganti dari program atau kebijakan yang spesifik dibutuhkan oleh perempuan dan oleh laki-laki;
2. Diperlukan reorientasi dalam banyak hal seperti paradigma dalam pembangunan: kerjasama sektor; pendanaan; indikator; sistem pendataan, dst);
3. Tidak berasumsi semua perencanaan pembangunan maupun kebijakan merupakan hal yang netral, sifatnya, atau tidak ada maksud diskriminatif;
4. Pengarusutamaan Gender (PUG) harus dapat melembaga dan memiliki langkah-langkah yang kongkrit;
5. Hasil PUG harus akuntable dan dapat dimonitor secara berkelanjutan;
6. Terdapat dukungan politik, dukungan pimpinan, sumberdaya maupun media.

Prinsip Pengarustamaan Gender (PUG) tersebut tentunya kemudian perlu diaplikasikan dalam perencanaan pembangunan sehingga dapat melembaga pada kehidupan masyarakat. Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun terus melakukan pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Adapun visi pemerintahan daerah, yaitu “ **Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia** ”.

Kemudian, misi dari Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah
5. Meningkatkan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat terlihat bahwa pelembagaan prinsip Pengarustamaan Gender (PUG) di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dilakukan dengan kongkrit dimana hal tersebut tercantum dalam misi ke-7 dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Selain itu, beberapa hal lain yang telah dilakukan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melembagakan Pengarustamaan Gender (PUG) adalah dengan melakukan analisis (GAP) dalam perencanaan program maupun kegiatan bagi tiap-tiap perangkat daerah. Disamping itu, Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah memiliki anggaran responsif gender beserta fasilitator anggaran responsif gender.

BAB IV

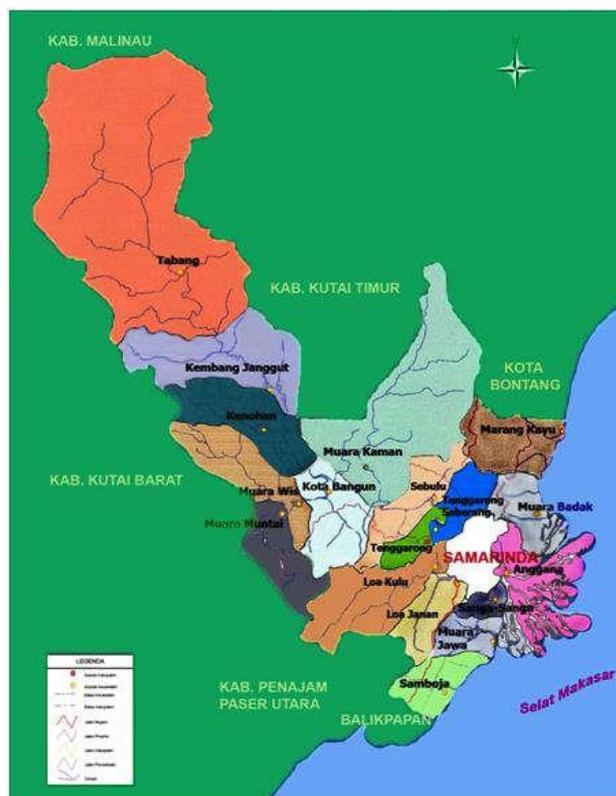
KONDISI UMUM DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4.1 Gambaran Geografis dan Demografis

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, secara keseluruhan luas wilayah daratan Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 27.263,10 km² dan luas perairan kurang lebih 4.097 km². Secara geografis terletak antara 115°26'28" BT-117°36'43" BT dan 1°28'21" LU-1°08'06" LS dengan batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Malinau
- Sebelah Timur : Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makassar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Paser dan Kota Balikpapan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kutai Barat



Sumber : BPS, Buku Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2018

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Kutai Kartanegara

Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi menjadi 18 Kecamatan 193 Desa dan 44 Kelurahan, dimana Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki Luas Wilayah paling besar yaitu Kecamatan Tabang dengan luas 7.764,50 Km² atau 28,48%, diikuti Kecamatan Muara Kaman seluas 3.410,10 Km² atau 12,51%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

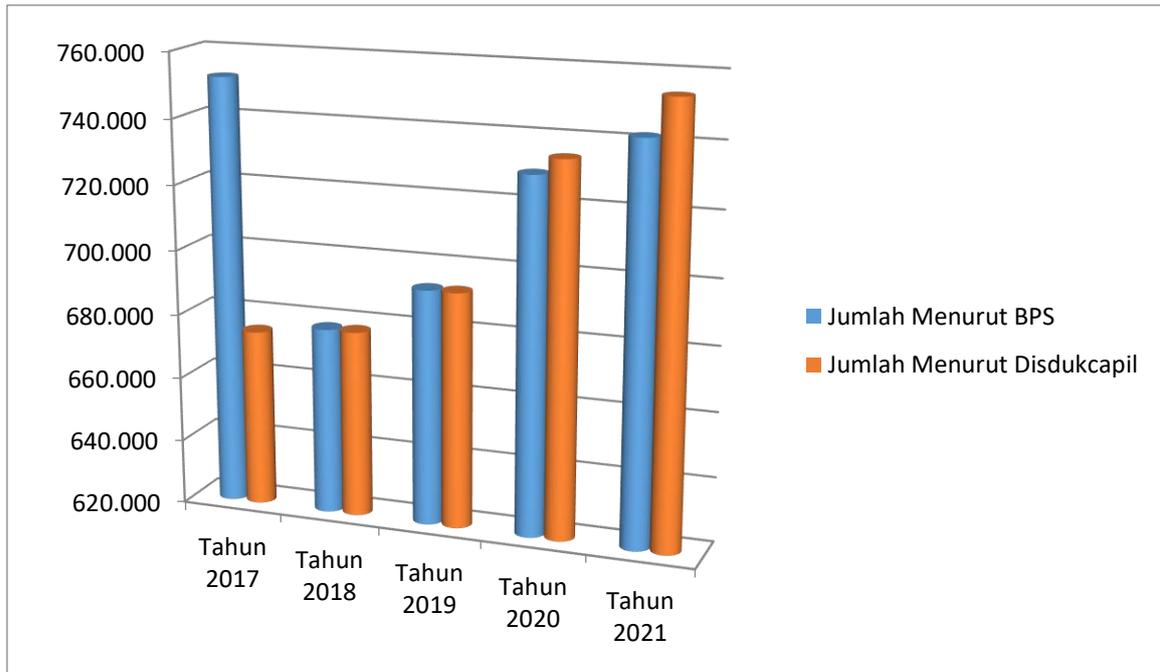
Tabel IV. 1
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kecamatan	Luas Area km ²	Persentase %
1.	Samboja	1.045,90	3,84
2.	Muara Jawa	754,50	2,77
3.	Sanga-Sanga	233,40	0,86
4.	Loa Janan	644,20	2,36
5.	Loa Kulu	1.405,70	5,16
6.	Muara Muntai	928,60	3,41
7.	Muara Wis	1.108,16	4,06
8.	Kota Bangun	1.143,74	4,20
9.	Tenggarong	398,10	1,46
10.	Sebulu	859,50	3,15
11.	Tenggarong Seberang	437	1,60
12.	Anggana	1.798,80	6,60
13.	Muara Badak	939,09	3,44
14.	Marang Kayu	1.165,71	4,28
15.	Muara Kaman	3.410,10	12,51
16.	Kenohan	1.302,20	4,78
17.	Kembang Janggut	1.923,90	7,06
18.	Tabang	7.764,50	28,48
Total		27.263,10	100,00

Sumber : BPS, Buku Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara selalu mengalami peningkatan pada periode tahun 2018 hingga 2022 meskipun jumlah penduduk yang tercatat di BPS dan Disdukcapil mengalami perbedaan. Berdasarkan data BPS pada Tahun 2020 Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebanyak 729.382 jiwa meningkat menjadi sebanyak 741.950 jiwa pada Tahun 2021. Sedangkan data Diskdukcapil pada Tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 692.776 jiwa dan meningkat

menjadi 741.950 jiwa pada Tahun 2021. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS, Buku Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2021 dan Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 - 2022

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019-2020 mencapai 2,32%. Jika dilihat per kecamatan maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Tenggarong merupakan kecamatan dengan penduduk tertinggi diantara kecamatan lainnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Tenggarong pada tahun 2021 mencapai 110,666 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019-2020 sebesar 3%. Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Muara Wis dengan jumlah penduduk hanya mencapai 9.366 jiwa dengan laju pertumbuhan yang cukup rendah yaitu sebesar 0,52% di tahun 2019-2020. Secara rinci jumlah dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017, 2019, dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 2
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022
 Sumber Data Konsolidasi (DKB) Semester 2

No.	Kecamatan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01.	Muara Muntai	18,729	17,251	18,165	19,962	20,732	20,885
02.	Loa Kulu	48,307	49,906	51,136	53,652	54,988	55,919
03.	Loa Janan	64,177	63,631	66,566	69,876	71,937	73,476
04.	Anggana	31,411	29,611	32,013	35,009	36,619	37,272
05.	Muara Badak	42,439	43,129	44,540	47,130	47,951	48,744
06.	Tenggarong	99,917	102,311	104,684	108,539	110,666	111,964
07.	Sebulu	37,985	38,784	38,641	40,652	41,746	42,407
08.	Kota Bangun	33,502	34,050	34,603	36,205	23,001	23,301
09.	Kenohan	10,895	10,478	10,991	11,549	11,852	11,987
10.	Kembang Janggut	22,803	22,010	21,971	23,635	24,572	25,290
11.	Muara Kaman	37,588	37,705	38,941	42,073	43,435	44,616
12.	Tabang	9,898	10,580	10,975	11,856	12,307	12,567
13.	Samboja	60,980	60,875	62,932	67,345	39,776	40,237
14.	Muara Jawa	38,801	39,020	40,219	41,778	42,622	43,219
15.	Sanga – Sanga	19,195	19,490	19,775	20,194	20,329	20,492
16.	Tenggarong Seberang	63,396	65,557	66,344	69,003	70,722	71,271
17.	Marang Kayu	25,938	24,910	25,656	26,902	27,857	28,119
18.	Muara Wis	8,798	8,457	8,632	9,125	9,366	9,461
19.	Kota Bangun Darat	-	-	-	-	13,612	13,859
20.	Samboja Darat	-	-	-	-	29,772	30,198
Jumlah		674,759	677,755	696,784	734,485	735,862	765,285

Sumber : DisdukCapil Kab. Kutai Kartanegara (DKB Bersih Semester 2) Tahun 2021

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 berdasarkan data Disdukcapil saat ini menunjukkan 17,52 % Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 mencapai 392,404 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan hanya mencapai 361,458 jiwa.



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

Gambar 4. 3 Prosentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kutai Kartanegara Tahun 2021

Sehingga pada tahun 2021 rasio jenis kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 108 atau dapat diartikan setiap 100 perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki. Jika dilihat per kecamatan terlihat bahwa rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Tenggarong yang mencapai 56,721. Secara rinci jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

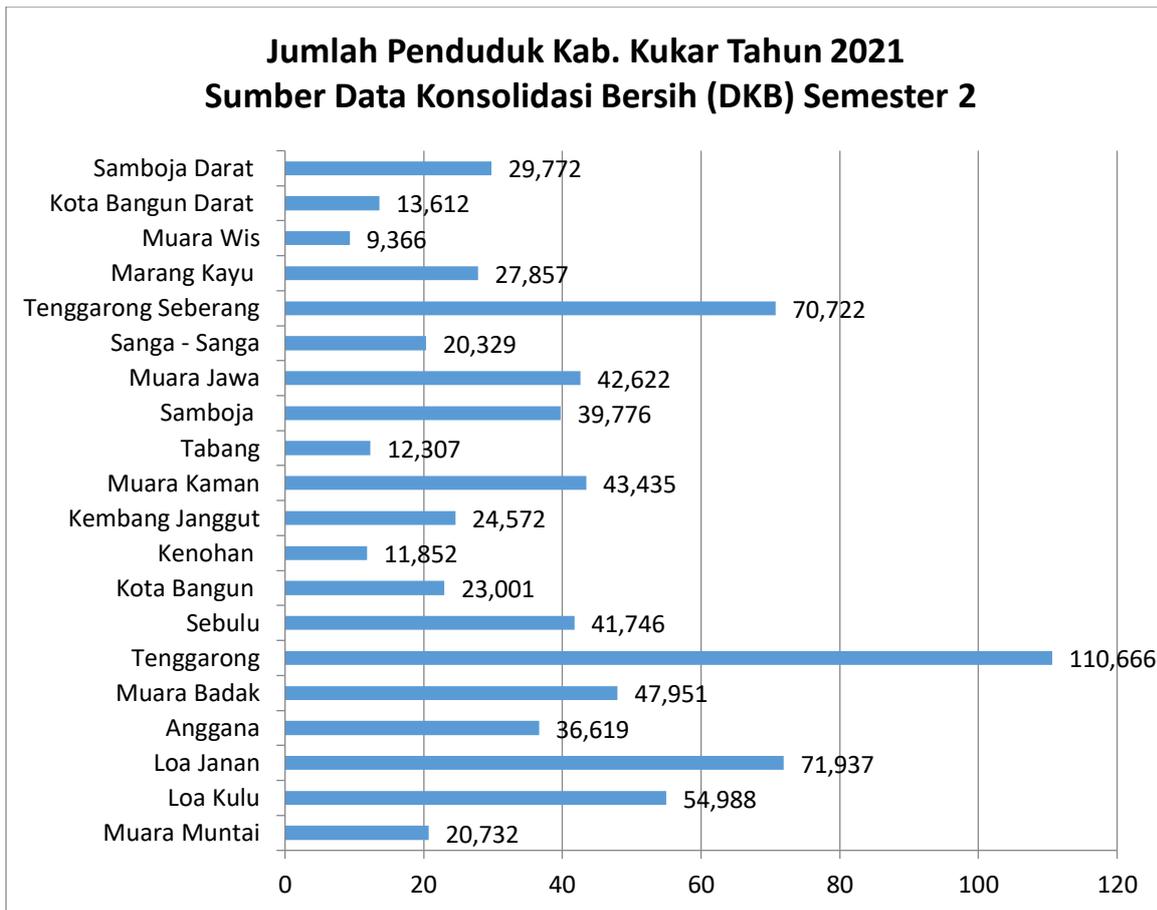
**Tabel IV. 3
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki – Laki	Perempuan		
01.	Muara Muntai	10,777	9,955	20,732	108.26
02.	Loa Kulu	28,639	26,349	54,988	108.69
03.	Loa Janan	37,670	34,267	71,937	109.93
04.	Anggana	19,040	17,579	36,619	108.31
05.	Muara Badak	24,929	23,022	47,951	108.28
06.	Tenggarong	56,721	53,945	110,666	105.15
07.	Sebulu	21,989	19,757	41,746	111.30

08.	Kota Bangun	11,766	11,235	23,001	104.73
09.	Kenohan	6,279	5,573	11,852	112.67
10.	Kembang Janggut	12,909	11,663	24,572	110.68
11.	Muara Kaman	23,099	20,336	43,435	113.59
12.	Tabang	6,495	5,812	12,307	111.75
13.	Samboja	20,610	19,166	39,776	107.53
14.	Muara Jawa	22,110	20,512	42,622	107.79
15.	Sanga – Sanga	10,404	9,925	20,329	104.83
16.	Tenggarong Seberang	36,775	33,947	70,722	108.33
17.	Marang Kayu	14,385	13,472	27,857	106.78
18.	Muara Wis	5,000	4,366	9,366	114.52
19.	Kota Bangun Darat	7,064	6,548	13,612	107.88
20.	Samboja Darat	15,743	14,029	29,772	112.22
Kabupaten Kutai Kartanegara		392,404	361,458	753,862	108.56

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara (DKB), 2021

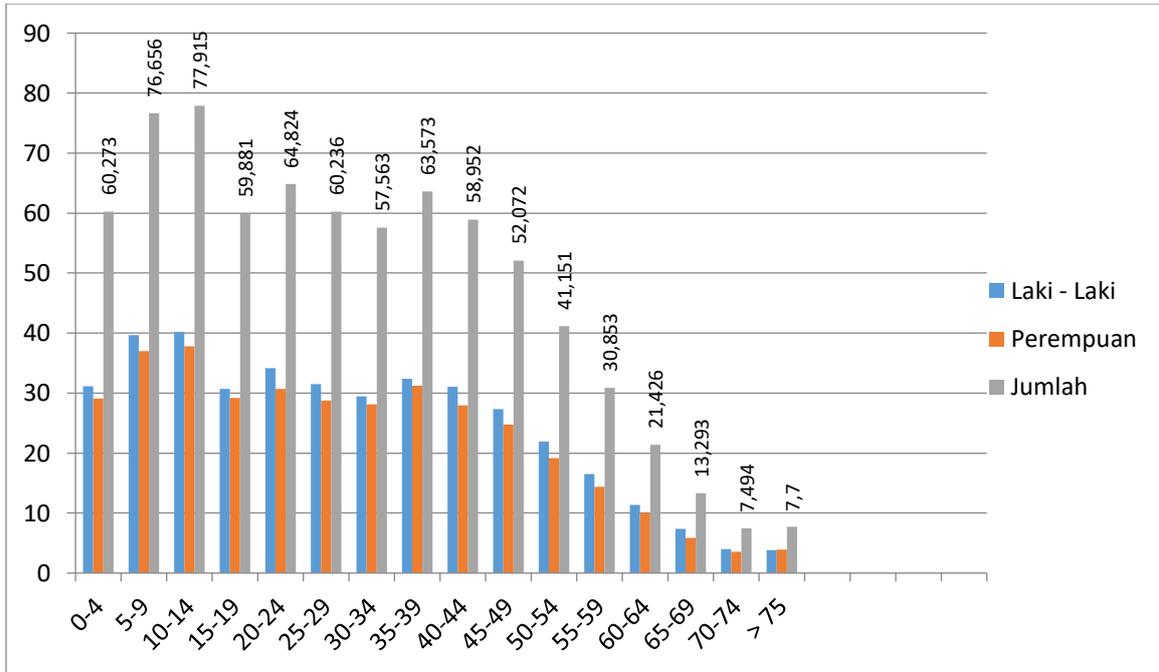
Kepadatan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2020 kepadatan penduduk tercatat sebesar 734,485 jiwa/km² kemudian tahun 2021 sebesar 753,862 jiwa/km². Jika dilihat berdasarkan kecamatan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Tenggarong dengan kepadatan sebesar 110,666 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Muara Wis sebesar 9,366 jiwa/km². Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Disdukcapil Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021

Gambar 4. 4 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 lebih mendominasi yaitu sebesar 579.873 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 173.989 jiwa. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin maka jumlah penduduk laki-laki lebih mendominasi pada tiap kelompok umur. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
01.	0-4	31.161	29.112	60.273
02.	5-9	39.633	37.023	76.656
03.	10-14	40.15	37.765	77.915
04.	15-19	30.686	29.195	59.881
05.	20-24	34.15	30.674	64.824
06.	25-29	31.464	28.772	60.236
07.	30-34	29.431	28.132	57.563
08.	35-39	32.384	31.189	63.573
09.	40-44	31.021	27.931	58.952
10.	45-49	27.287	24.785	52.072
11.	50-54	21.958	19.193	41.151
12.	55-59	16.479	14.374	30.853
13.	60-64	11.401	10.025	21.426
14.	65-69	7.397	5.896	13.293
15.	70-74	3.971	3.523	7.494
16.	>75	3.831	3.869	7.700
TOTAL		392.404	361.458	753.862

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Gambar 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Jumlah kepala keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 239,502 KK menjadi 245,883 KK.

Kecamatan yang memiliki jumlah KK terbanyak adalah Kecamatan Tenggara yang mencapai 34,971 KK. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut.

Tabel IV. 4
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2017-2022

No.	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01.	Muara Muntai	5.453	5.224	5,748	6,391	6,633	6,734
02.	Loa Kulu	14.878	15.595	16,435	17,397	17,892	18,252
03.	Loa Janan	20.523	20.547	22,430	23,940	24,652	25,546
04.	Anggana	9.083	8.932	9,868	11,212	11,649	11,953
05.	Muara Badak	12.935	13.535	14,262	15,235	15,516	15,876
06.	Tenggara	29.388	30.805	32,391	34,182	34,971	35,823
07.	Sebulu	11.178	11.953	12,230	13,218	13,553	13,833
08.	Kota Bangun	9.733	10.331	10,831	11,456	7,218	7,330
09.	Kenohan	3.151	3.282	3,607	3,758	3,884	3,957
10.	Kembang Janggut	6.851	6.951	7,073	7,763	8,069	8,339
11.	Muara Kaman	11.027	11.49	12,111	13,375	13,829	14,278
12.	Tabang	2.823	3.164	3,470	3,745	3,886	4,038
13.	Samboja	18.586	19.285	20,499	21,809	12,458	12,686
14.	Muara Jawa	11.613	12.054	12,716	13,093	13,294	13,663
15.	Sanga – Sanga	5.908	6.223	6,471	6,649	6,684	6,787
16.	Tenggara Seberang	19.589	20.52	21,607	22,719	23,223	23,633
17.	Marang Kayu	7.517	7.795	8,116	8,644	8,969	9,090
18.	Muara Wis	2480	2.557	2,638	2,896	2,990	3,026
19.	Kota Bangun Darat	-	-	-	-	4,524	4,609
20.	Samboja Darat	-	-	-	-	9,968	10,214
JUMLAH		4697.236	2228.243	224,522	239,502	245,883	249,667

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

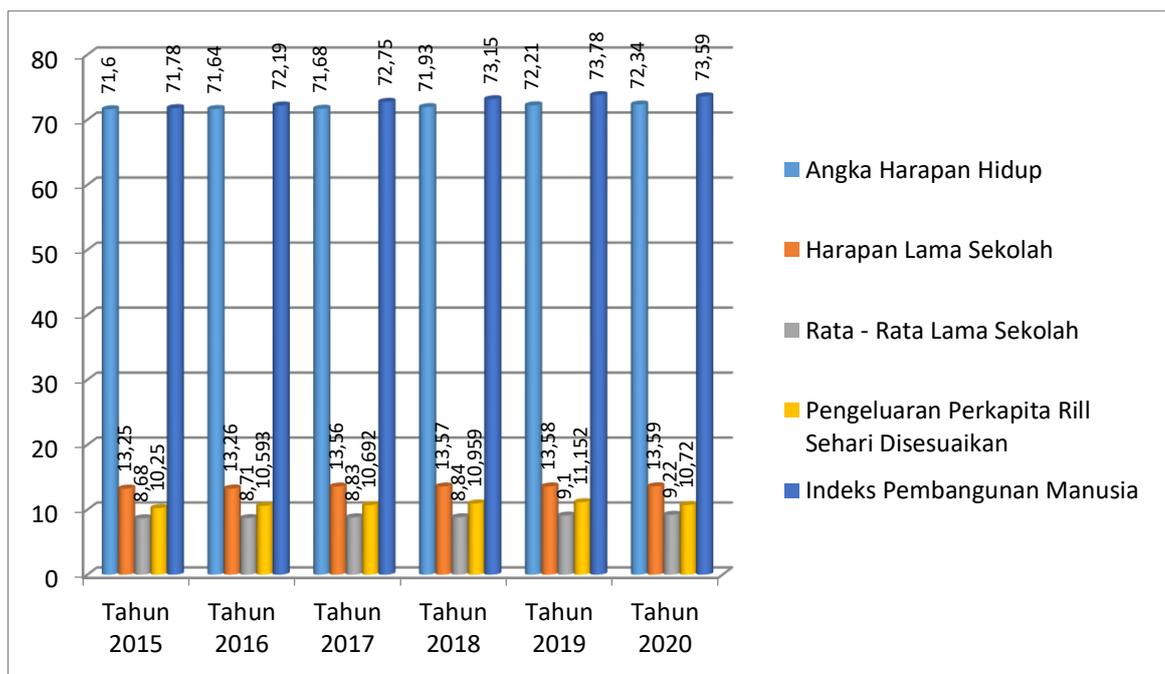
4.2 Gambaran Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator yang mencerminkan kualitas hidup

penduduk yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Rill Per Kapita.

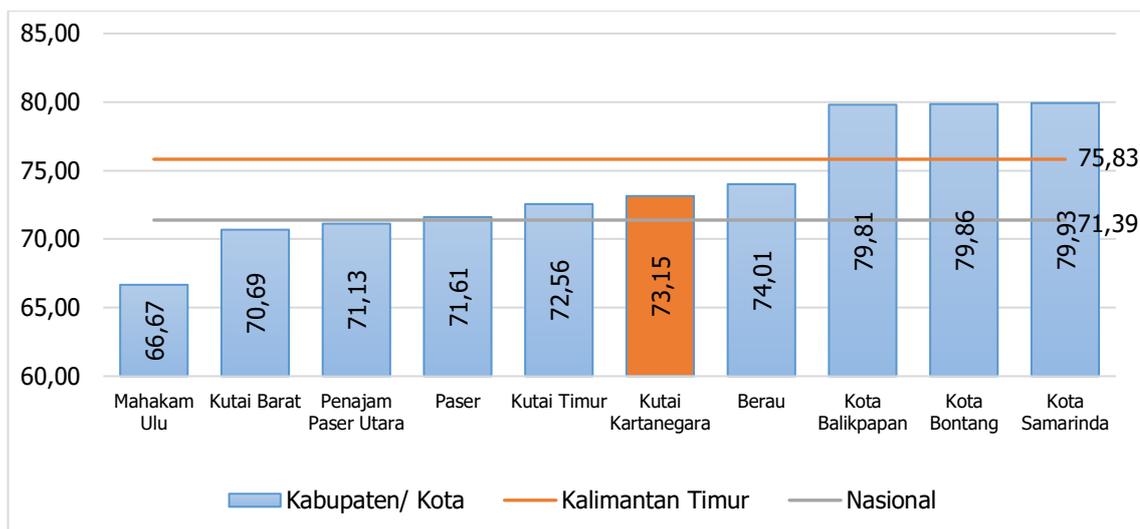
Perkembangan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 hingga tahun 2020 terus meningkat, yaitu pada tahun 2017 sebesar 72,75 dan pada tahun 2020 menjadi 73,59. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional yang juga terus meningkat tiap tahun pada periode tahun yang sama. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 4. 6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Posisi relatif IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017 sebesar 72,75 berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 75,83 dan diatas Nasional sebesar 71,39. Dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018, Kabupaten Kutai Kartanegara berada di posisi lima tertinggi, yaitu setelah Kabupaten Berau yaitu 74,01. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2019

Posisi relatif IPM laki - laki Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 sebesar 79,14 sedangkan di tahun 2021 sebesar 79,47 berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 81,86 ditahun 2021. Dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021, Kabupaten Kutai Kartanegara berada di posisi lima tertinggi, yaitu setelah Kabupaten Berau yaitu 74,33. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki – Laki Menurut Kabupaten / Kota (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	76,57	77,00	77,55	77,44	78,33
Kutai Barat	75,85	76,29	77,17	76,63	77,31
Kutai Kartanegara	78,18	78,51	79,14	79,04	79,47
Kutai Timur	77,40	77,97	78,89	78,40	79,21
Berau	77,94	78,34	79,31	79,28	79,72
Penajam Paser Utara	75,29	75,83	76,44	76,10	76,63
Mahakam Ulu	73,34	73,87	74,52	73,86	74,33
Balikpapan	84,05	84,85	85,22	85,14	85,75
Samarinda	83,68	84,12	84,42	84,34	85,07
Bontang	84,66	84,96	85,15	84,92	85,33
Kalimantan Timur	80,03	80,82	81,58	81,32	81,86

Sumber : BPS Nasional, 2021

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 62,63 tahun dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 62,88 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur, secara rinci dapat dilihat pada Table berikut.

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia Perempuan Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	53,43	54,39	55,38	55,10	55,76
Kutai Barat	63,18	63,72	64,70	64,27	65,16
Kutai Kartanegara	61,40	61,89	62,63	62,36	62,88
Kutai Timur	58,42	59,28	60,36	59,79	60,52
Berau	68,41	68,88	69,74	69,46	69,96
Penajam Paser Utara	64,98	65,47	65,91	65,74	66,34
Mahakam Ulu	58,54	59,23	60,28	59,81	60,69
Balikpapan	75,43	76,16	76,45	76,33	77,03
Samarinda	74,69	75,22	75,48	75,29	75,94
Bontang	73,18	73,58	73,84	73,77	74,34
Kalimantan Timur	68,52	69,21	70,14	69,69	70,36

Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 4. 7 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 - 2021

IPM diukur menggunakan beberapa indikator pembentuk IPM, yang meliputi Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita dengan uraian sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup Laki – Laki

Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 70,23 tahun dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 70,67 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, secara rinci dapat dilihat pada Table berikut.

Kabupaten / Kota	Umur Harapan Hidup (UHH) Laki – Laki Menurut Kabupaten / Kota (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	70,07	70,31	70,55	70,65	70,86
Kutai Barat	70,39	70,59	70,83	70,92	71,13
Kutai Kartanegara	69,68	69,93	70,23	70,39	70,67
Kutai Timur	70,54	70,79	71,08	71,22	71,50

Berau	69,44	69,68	69,96	70,10	70,34
Penajam Paser Utara	69,30	69,53	69,76	69,85	70,05
Mahakam Ulu	69,24	69,55	69,91	70,14	70,34
Balikpapan	72,05	72,26	72,51	72,62	72,86
Samarinda	71,78	72,00	72,26	72,38	72,62
Bontang	71,79	72,02	72,27	72,38	72,63
Kalimantan Timur	71,87	72,13	72,41	72,54	72,79

Sumber : BPS Nasional, 2021

b. Angka Harapan Hidup Perempuan

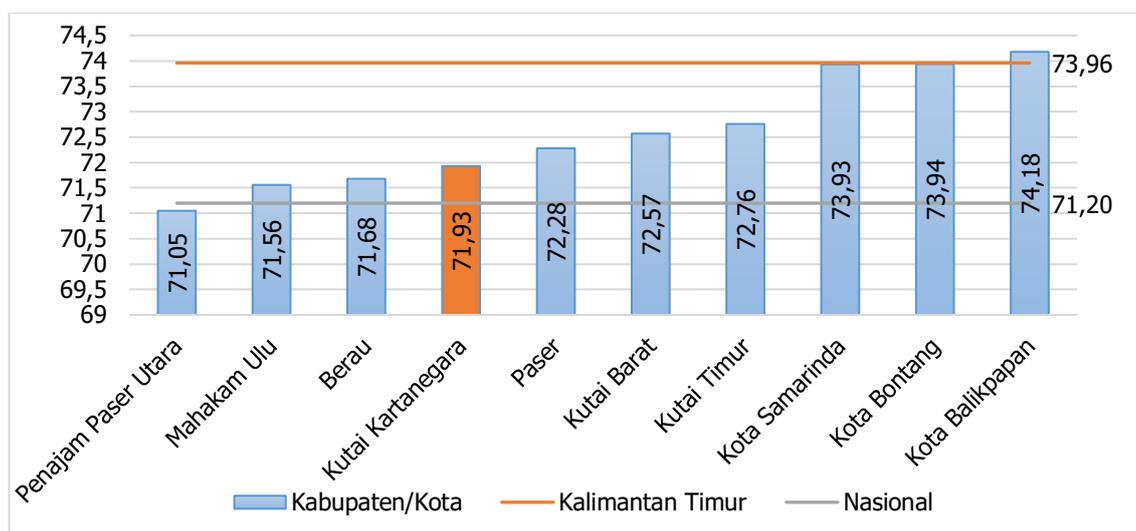
Perkembangan Angka Harapan Hidup Perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 74,08 tahun dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 74,50 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, secara rinci dapat dilihat pada Table berikut.

Kabupaten / Kota	Umur Harapan Hidup (UHH) Perempuan Menurut Kabupaten / Kota (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	73,92	74,15	74,39	74,66	74,84
Kutai Barat	74,23	74,42	74,64	74,86	74,95
Kutai Kartanegara	73,56	73,81	74,08	74,36	74,50
Kutai Timur	74,37	74,62	74,88	75,16	75,32
Berau	73,32	73,55	73,81	74,08	74,13
Penajam Paser Utara	73,08	73,31	73,56	73,83	74,05
Mahakam Ulu	73,14	73,45	73,78	74,12	74,14
Balikpapan	75,88	76,09	76,21	76,33	76,55
Samarinda	75,68	75,90	75,98	76,06	76,23
Bontang	75,66	75,88	75,99	76,10	76,27
Kalimantan Timur	75,61	75,87	76,13	76,21	76,51

Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 4. 8 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 sebesar 71,93 tahun berada di atas capaian Nasional sebesar 71,20 tahun dan dibawah capaian Kalimantan Timur sebesar 73,96 tahun, serta menempati posisi keempat terendah dibandingkan Kabupaten/Kota sekitarnya di Kalimantan Timur, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2019

Gambar 4. 9 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

c. Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki – Laki Menurut Kabupaten / Kota (Tahun)

Untuk Harapan Lama Sekolah yang merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Laki - Laki Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 13,52 tahun dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 13,54 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur, secara rinci dapat dilihat pada table berikut.

Kabupaten / Kota	Harapan lama Sekolah (HLS) Laki - Laki Menurut Kabupaten / Kota (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	12,86	12,87	12,88	13,01	13,18
Kutai Barat	13,05	13,06	13,07	13,08	13,09
Kutai Kartanegara	13,50	13,51	13,52	13,53	13,54
Kutai Timur	12,52	12,74	12,75	12,76	12,77

Berau	12,89	12,90	12,91	13,01	13,02
Penajam Paser Utara	12,27	12,28	12,41	12,42	12,43
Mahakam Ulu	12,98	12,99	13,00	13,01	13,02
Balikpapan	13,74	14,12	14,13	14,14	14,22
Samarinda	14,37	14,44	14,46	14,70	15,00
Bontang	13,20	13,21	13,22	13,23	13,24
Kalimantan Timur	13,42	13,67	13,68	13,71	13,80

Sumber : BPS Nasional, 2021

d. Harapan Lama Sekolah (HLS) Perempuan Menurut Kabupaten / Kota (Tahun)

Untuk Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 13,64 tahun dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 13,66 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur, secara rinci dapat dilihat pada table berikut.

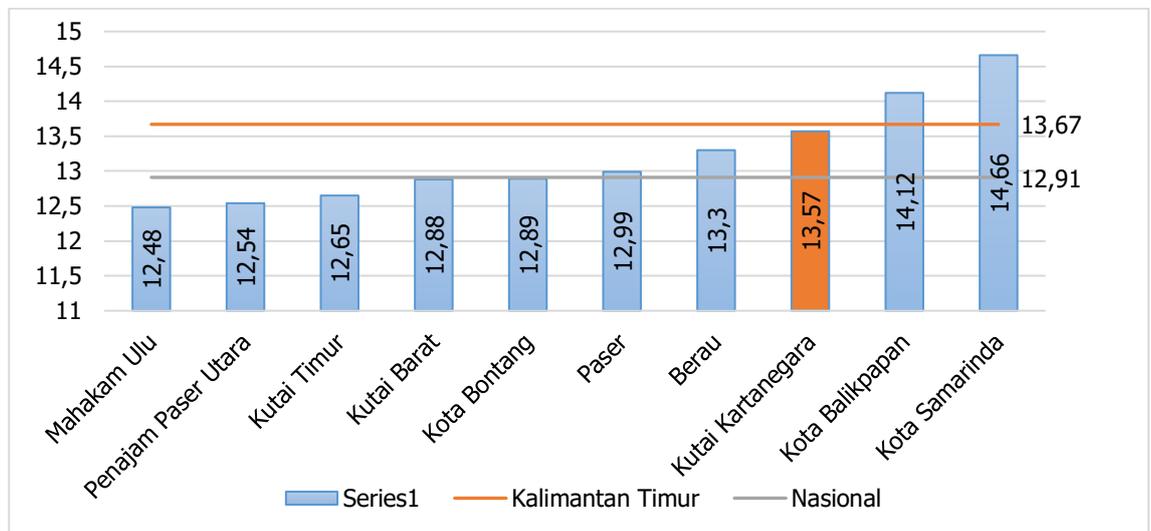
Kabupaten / Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS) Perempuan Menurut Kabupaten / Kota (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	13,43	13,44	13,45	13,46	13,47
Kutai Barat	12,77	12,86	12,88	12,90	13,02
Kutai Kartanegara	13,62	13,63	13,64	13,65	13,66
Kutai Timur	12,45	12,49	12,79	12,97	13,00
Berau	14,18	14,19	14,20	14,21	14,22
Penajam Paser Utara	12,59	12,60	12,61	12,62	12,63
Mahakam Ulu	12,41	12,43	12,48	12,49	12,59
Balikpapan	14,00	14,27	14,29	14,30	14,31
Samarinda	14,71	14,72	14,77	14,92	15,12
Bontang	12,87	12,88	12,89	13,03	13,17
Kalimantan Timur	13,67	13,68	13,86	13,87	13,88

Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 4. 10 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 - 2021

Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 sebesar 13,57 tahun berada di atas

capaian Nasional 12,91 tahun dan di bawah capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar 13,67 tahun. Dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017, Kabupaten Kutai Kartanegara menempati posisi ketiga tertinggi setelah Samarinda sebesar 14,66 tahun dan Balikpapan sebesar 14,12 tahun, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2019

Gambar 4. 11 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

e. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Laki – Laki Menurut Kabupaten / Kota Tahun

Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 9,43 tahun dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 9,58 tahun. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Kalimantan Timur yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Kabupaten / Kota	Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) Laki - Laki Menurut Kabupaten / Kota (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021

Paser	8,58	8,68	8,82	8,90	9,15
Kutai Barat	8,81	8,82	9,06	9,07	9,34
Kutai Kartanegara	9,18	9,19	9,43	9,57	9,58
Kutai Timur	9,28	9,29	9,62	9,63	9,89
Berau	9,22	9,24	9,62	9,89	9,90
Penajam Paser Utara	8,43	8,51	8,64	8,65	8,80
Mahakam Ulu	8,88	8,89	8,90	8,91	8,92
Balikpapan	11,06	11,17	11,18	11,19	11,36
Samarinda	10,68	10,78	10,85	10,89	10,90
Bontang	11,05	11,06	11,07	11,10	11,11
Kalimantan Timur	9,75	9,86	10,11	10,22	10,23

Sumber : BPS Nasional, 2021

f. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan Menurut Kabupaten / Kota Tahun

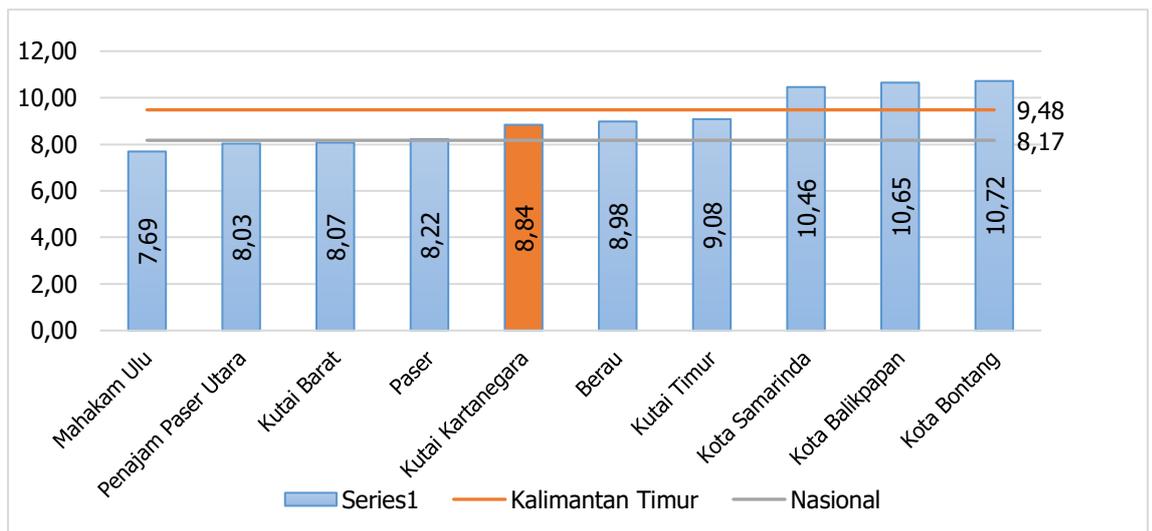
Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 8,52 tahun dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 8,64 tahun. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Kalimantan Timur yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Kabupaten / Kota	Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan Menurut Kabupaten / Kota (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	7,78	7,79	8,12	8,13	8,36
Kutai Barat	7,59	7,60	7,87	8,05	8,14
Kutai Kartanegara	8,14	8,18	8,52	8,63	8,64
Kutai Timur	8,54	8,67	8,68	8,69	8,78
Berau	8,65	8,66	8,90	9,12	9,13
Penajam Paser Utara	7,54	7,55	7,63	7,82	7,83
Mahakam Ulu	7,32	7,33	7,57	7,90	8,11
Balikpapan	10,22	10,32	10,34	10,35	10,69
Samarinda	9,76	9,96	9,97	9,98	9,99
Bontang	10,36	10,41	10,42	10,53	10,54
Kalimantan Timur	8,93	9,06	9,25	9,27	9,42

Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 4. 12 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 sebesar 8,84 tahun masih di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur Tengah sebesar 9,48 tahun dan di atas Nasional sebesar 8,17 tahun. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur pada tahun 2018, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara menempati posisi keenam tertinggi, secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2019

Gambar 4. 13 Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

g. Pengeluaran Per Kapita Laki – Laki Menurut Kabupaten / Kota (Ribu Rupiah / Kapita / Tahun)

Pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa semakin meningkatnya daya beli masyarakat sebagai simbol kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Laki - Laki Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 18.272 ribu dan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 18,079 ribu. Kondisi pengeluaran per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara relevan dengan perkembangan pengeluaran Per Kapita Provinsi Kalimantan

Timur sama-sama mengalami penurunan, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Kabupaten / Kota	Pengeluaran Per Kapita Laki – Laki Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	16.968	12.299	17.761	16.973	17.502
Kutai Barat	14.622	15.120	15.848	14.869	15.225
Kutai Kartanegara	17.606	17.952	18.272	17.553	18,079
Kutai Timur	17.067	17.446	18.089	16.990	17.595
Berau	18.560	19.078	19.791	18.598	19.231
Penajam Paser Utara	16.883	17.467	17.818	17.020	17.445
Mahakam Ulu	11.908	12.355	12.941	11.951	12,385
Balikpapan	22.034	22.451	22.993	22.602	23.073
Samarinda	21.075	21.390	21.525	20.542	21.177
Bontang	25.587	26.035	26.174	25.180	25.917
Kalimantan Timur	17.830	18.342	18.937	17.958	18.560

Sumber : BPS Nasional, 2021

h. Pengeluaran Per Kapita Perempuan Menurut Kabupaten / Kota (Ribu Rupiah / Kapita / Tahun)

Pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa semakin meningkatnya daya beli masyarakat sebagai simbol kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 4.646 ribu dan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 4.625 ribu. Kondisi pengeluaran per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara relevan dengan perkembangan pengeluaran Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur sama-sama mengalami penurunan, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

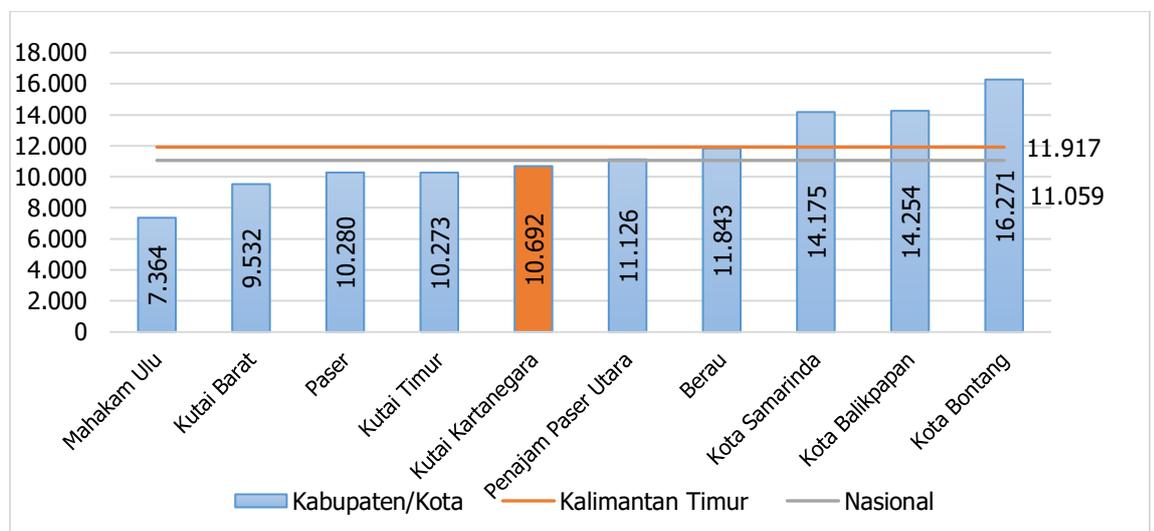
Kabupaten / Kota	Pengeluaran Per Kapita Perempuan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	2.733	2.869	2.968	2.902	2.965
Kutai Barat	5.549	5.717	5.983	5.630	5.930
Kutai Kartanegara	4.444	4.555	4.646	4.477	4.625
Kutai Timur	3.685	3.835	4.027	3.802	3.947
Berau	7.182	7.401	7.705	7.284	7.574
Penajam Paser Utara	6.872	7.097	7.246	6.915	7.218
Mahakam Ulu	4.216	4.388	4.593	4.273	4.449
Balikpapan	10.498	10.755	10.950	10.756	10.953

Samarinda	9.754	9.927	10.081	9.737	10.070
Bontang	9.378	9.577	9.752	9.409	9.712
Kalimantan Timur	6.751	6.994	7.255	6.943	7.161

Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 4. 14 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Capaian pengeluaran per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 sebesar Rp 10.692 ribu berada di bawah Nasional sebesar Rp 11.059 ribu dan Provinsi Kalimantan timur sebesar Rp 11.917 ribu, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur capaian pengeluaran per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara menempati posisi kelima terendah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2018

Gambar 4. 15 Posisi Relatif Pengeluaran Perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 (ribu)

2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks pembangunan gender (IPG) menggambarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan indikator IPM yang di pilah laki-laki dan perempuan, hal ini penting untuk mengetahui ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Untuk menggambarkan ketimpangan gender diketahui dari skor nilai IPG dengan nilai 100. Nilai IPG semakin dekat dengan nilai 100 maka ketimpangan gender semakin rendah dan semakin

rendah nilai maka ketimpangan gender semakin tinggi. terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan sumbangan ekonomi rumah tangga dari laki-laki dan perempuan.

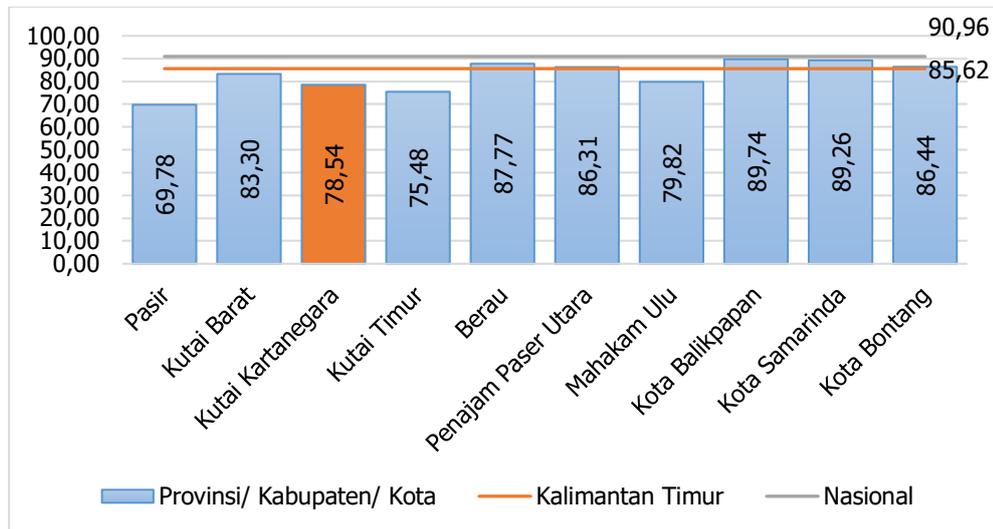
Perkembangan IPG di Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu lima tahun menurun, yaitu pada tahun 2019 sebesar 79,14 hingga tahun 2020 menjadi sebesar 78,90. IPG Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 sebesar 79,12 kondisi ini berkontribusi positif terhadap perkembangan IPG Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional pada periode tahun yang sama mengalami perkembangan meningkat dan mengindikasikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table berikut.

Kabupaten / Kota	Pengeluaran Per Kapita Perempuan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	69,78	70,64	71,41	71,15	71,19
Kutai Barat	83,30	83,52	83,84	83,87	84,28
Kutai Kartanegara	78,54	78,83	79,14	78,90	79,12
Kutai Timur	75,48	76,03	76,51	76,26	76,40
Berau	87,77	87,92	87,93	87,61	87,76
Penajam Paser Utara	86,31	86,34	86,22	86,39	86,57
Mahakam Ulu	79,82	80,18	80,89	80,98	81,65
Balikpapan	89,74	89,76	89,71	89,65	89,83
Samarinda	89,26	89,42	89,41	89,27	89,27
Bontang	86,44	86,61	86,72	86,87	87,12
Kalimantan Timur	85,62	85,63	85,98	85,70	85,95

Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 4. 16 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Posisi relatif Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017 sebesar 78,54 berada di bawah rata-rata capaian IPG Kalimantan Timur sebesar 85,62 dan Nasional sebesar 90,96. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, capaian IPG di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 berada di posisi tiga terendah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2018

Gambar 4. 17 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak berbeda dengan komponen pembentuk IPM hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin. Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 sebesar 74,50 tahun lebih tinggi dibandingkan laki-laki 70,67 tahun.

Harapan lama sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 perempuan sebesar 13,66 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sebesar 13,54 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah da Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, laki-laki (9,58 tahun) lebih mendominasi dibandingkan perempuan (8,64 tahun), dan pengeluaran per kapita laki-laki (Rp 18.079) lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan sebesar (Rp 4.625). Adapun rincian data komponen pembentuk IPG Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 5
Perkembangan Indikator Komposit IPG
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Tahun	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Per Kapita	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2017	69,68	73,56	13,50	13,62	9,18	8,14	17.606	4.444
2018	69,93	73,81	13,51	13,63	9,19	8,18	17.952	4.555
2019	70,23	74,08	13,52	13,64	9,43	8,52	18.272	4.646
2020	70,39	74,36	13,53	13,65	9,57	8,63	17.553	4.477
2021	70,67	74,50	13,54	13,66	9,58	8,64	18.079.	4.625

Sumber : BPS Nasional, 2021

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dipergunakan untuk menggambarkan keberhasilan pemberdayaan kaum perempuan, terutama dari aspek keterwakilan perempuan di parlemen (%), persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja dengan keahlian/keterampilan (administrasi, manajer dan teknisi), serta sumbangan ekonomi rumah tangga (%) dari kaum perempuan.

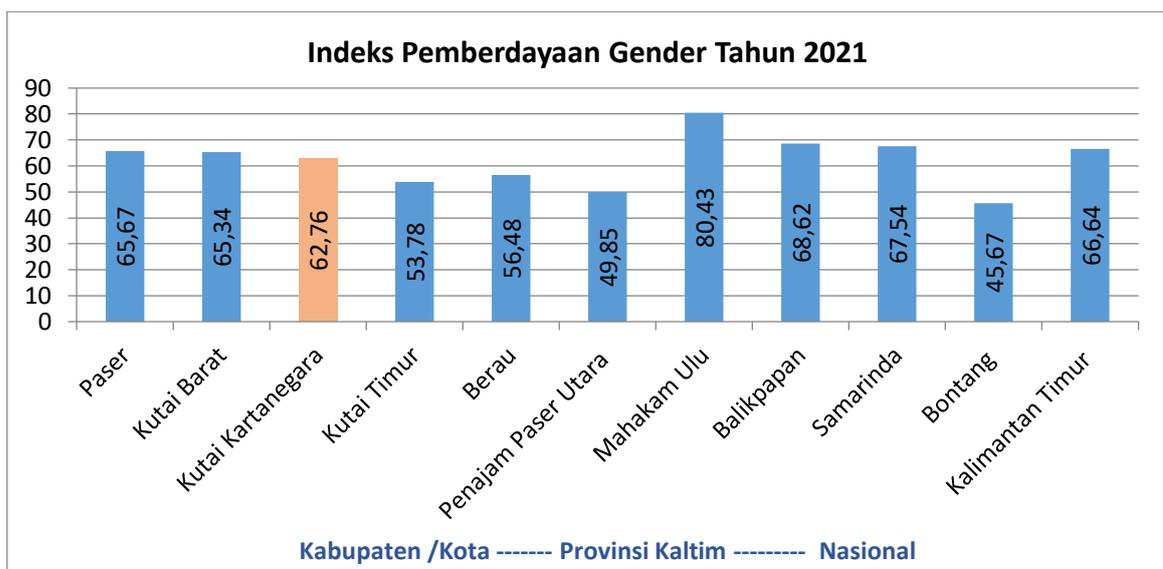
Perkembangan IDG Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami perkembangan yang meningkat, pada tahun 2017 IDG Kutai Kartanegara sebesar 55,07 meningkat menjadi sebesar 62,76 pada tahun 2021. Perkembangan IDG Kutai Kartanegara pada tahun 2021 mengalami peningkatan tidak relevan dengan kondisi IDG Kalimantan Timur yang menurun, tetapi relevan dengan IDG Nasional yang juga mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Indeks	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kutai Kartanegara	78,54	78,83	79,14	78,90	79,12
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kutai Kartanegara	55,07	56,44	63,74	61,43	62,76

Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 4. 18 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Posisi relatif Indeks pemberdayaan gender Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 sebesar 62,76 berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 66,64 dan Nasional 71,74. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya IDG Kabupaten Kutai Timur menempati posisi kelima terendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2021

Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	62,07	62,76	66,20	65,66	65,67
Kutai Barat	62,63	63,68	61,14	60,60	65,34
Kutai Kartanegara	55,07	56,44	63,74	61,43	62,76
Kutai Timur	53,71	55,72	56,35	53,77	53,78
Berau	49,85	50,55	57,66	57,91	56,48
Penajam Paser Utara	50,30	50,02	50,36	49,75	49,85
Mahakam Ulu	74,12	76,04	80,61	80,41	80,43
Balikpapan	65,52	66,33	69,11	68,97	68,62
Samarinda	70,84	69,61	66,29	70,65	67,54
Bontang	45,44	46,36	51,99	51,97	45,67
Kalimantan Timur	56,64	57,53	65,65	65,54	66,64

Table 4. 19 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 - 2021

Komponen pembentuk Indeks pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 hingga 2017, dilihat dari perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen dari tahun 2017 hingga tahun 2012 cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2013 sebesar 2,22% dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 8,89%.

Kondisi Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 hingga tahun 2017 terus menurun, yaitu pada tahun 2013 dari sebesar 48,36% kemudian tahun 2017 menjadi 39,26%. Berbeda dengan kondisi indikator komposit IDG lainnya, sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami kenaikan tiap tahun, yaitu dari 22,74% pada tahun 2013 menjadi 24,30% pada tahun 2017. Secara rinci perkembangan komponen pembentuk IDG Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 6
Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2017
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	2,22	6,67	8,89	8,89
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	48,36	48,33	36,38	39,26
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	22,74	22,98	23,80	24,30

Sumber : BPS Nasional, 2018

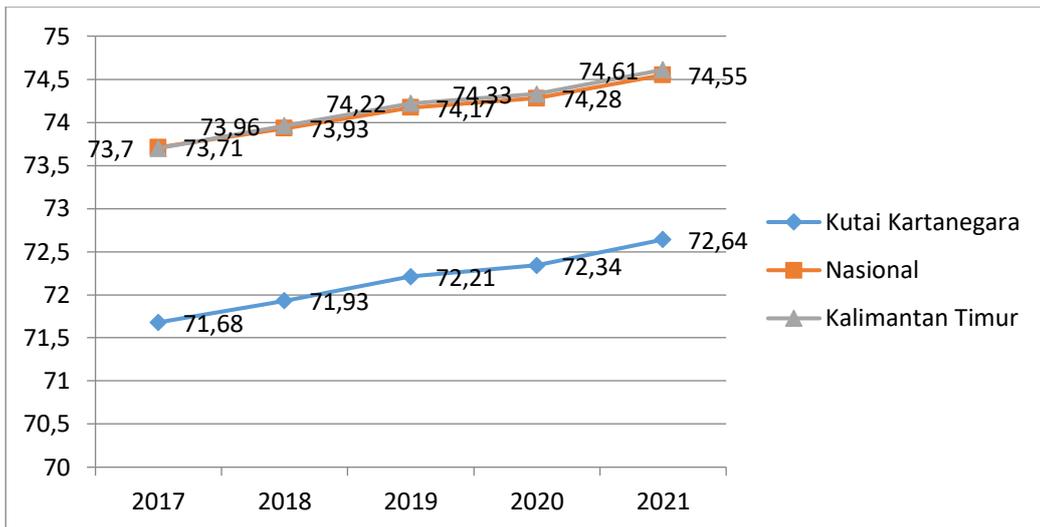
BAB V

PROFIL GENDER DI BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pemberian pelayanan kesehatan yang tepat, merata dan terjangkau. Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah tercermin dari adanya peningkatan baik di bidang kualitas maupun kuantitas dari pelayanan kesehatan yang diberikan. Pada tahun 2017 tercatat telah terdapat 3 unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 32 unit Puskesmas serta 174 unit Puskesmas Pembantu. Selain infrastruktur, pembangunan di bidang kesehatan juga dengan peningkatan pelayanan kesesehatan. Pembangunan kesehatan tersebut tentunya harus dapat bermanfaat serta menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang kemudian dapat pula mendukung Pengarasutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut merupakan gambaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.1 Angka Harapan Hidup

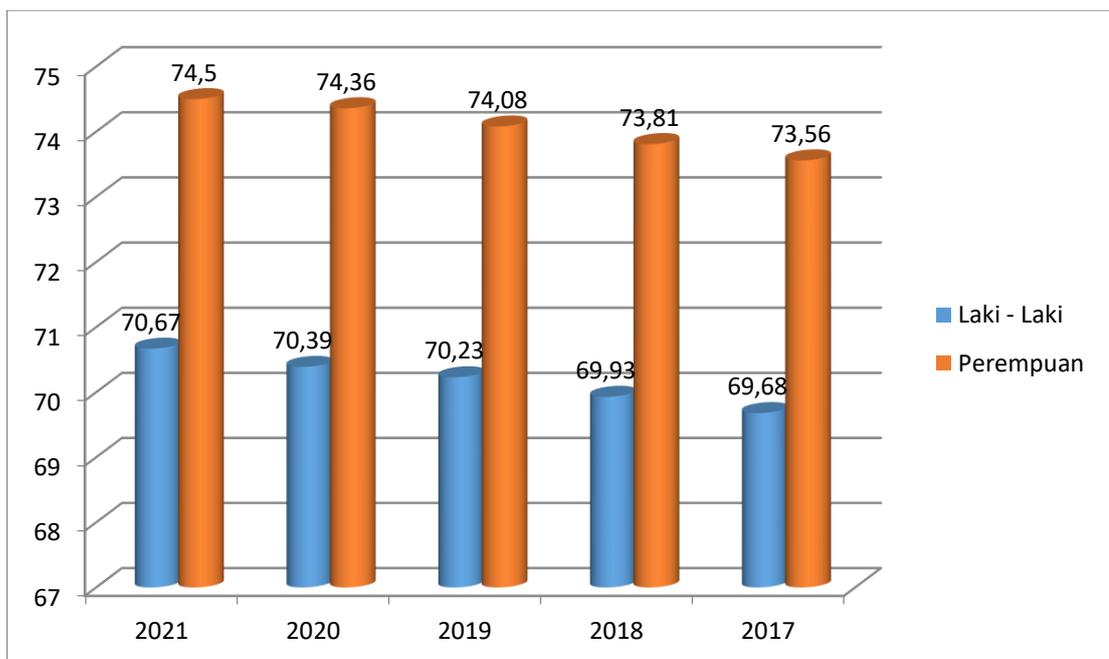
Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 72,21 tahun dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 72,64 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2022

Gambar 5. 1 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Jika dilihat dari perspektif gender maka dapat diketahui bahwa angka harapan hidup perempuan di Kutai Kartanegara lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2021 angka harapan hidup laki-laki hanya mencapai 70,67 tahun sedangkan perempuan mencapai 74,50 tahun.



Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 5. 2 Perkembangan Angka Harapan Hidup berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

1.2 Angka Kematian dan Penyebab Kematian Ibu Melahirkan

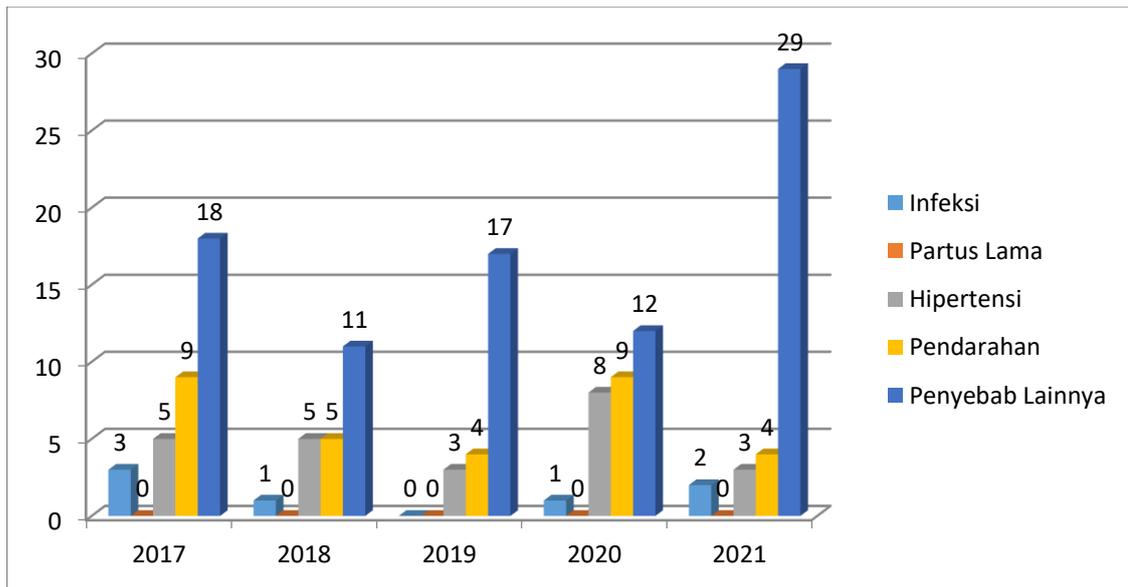
Salah satu indikator yang menggambarkan kualitas kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu nifas. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah angka kematian ibu mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung meningkat pada tahun 2019 menjadi 24 kasus dari yang sebelumnya mencapai 22 kasus pada tahun 2018. Jumlah kematian ibu nifas menyumbang rata-rata jumlah yang cukup tinggi diantara dua kategori lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel V. 1
Jumlah Kematian Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 – 2021**

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kematian Ibu Hamil	11	6	12	9	14
Jumlah Kematian Ibu Bersalin	8	8	5	12	6
Jumlah Kematian Ibu Nifas	16	8	7	9	18
Jumlah	35	22	24	30	38

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

Penyebab dari kematian ibu melahirkan biasanya disebabkan karena penyebab-penyebab lain selain partus lama, infeksi, hipertensi, dan pendarahan. Kemudian penyakit lainnya yang biasanya menyebabkan kematian ibu melahirkan adalah hipertensi yang mencapai 3 kasus pada tahun 2021.

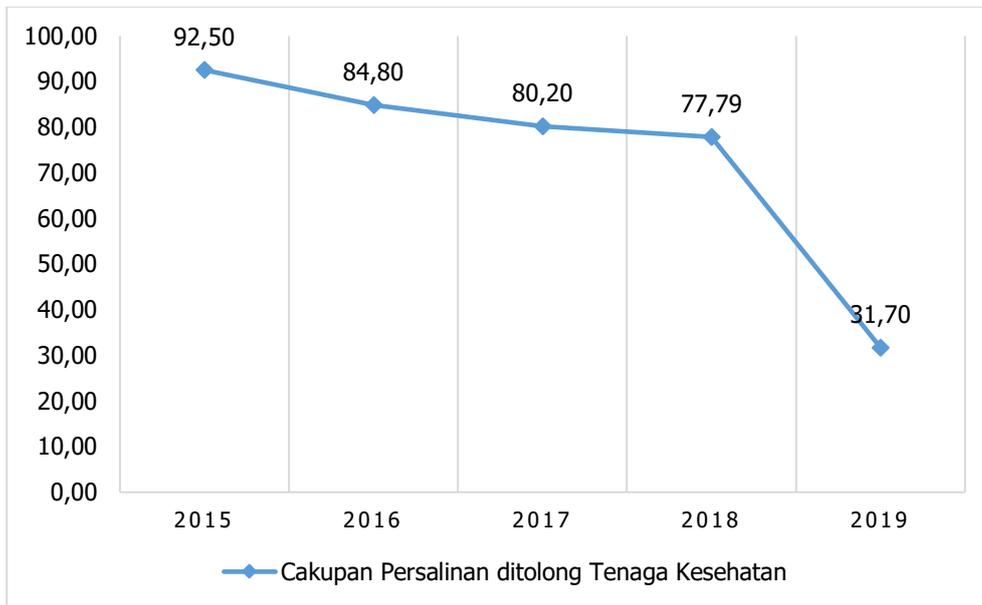


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

Gambar 5. 3 Penyebab Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

1.3 Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan

Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami penurunan. Cakupan persalinan pada tahun 2015 mencapai 92,50% kemudian terus menurun hingga pada tahun 2019 hanya mencapai 31,70%. Hal tersebut menggambarkan bahwa kasus persalinan yang tanpa ditolong tenaga kesehatan cukup tinggi, kenyataan tingginya persalinan yang tidak ditolong tenaga kesehatan menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

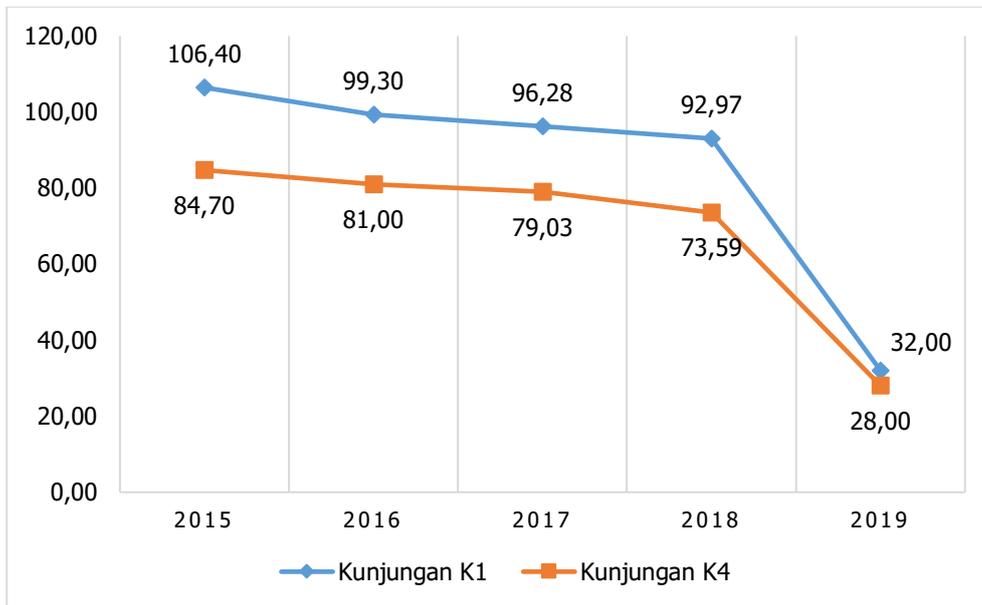


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

Gambar 5. 4 Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2019

1.4 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas

Istilah kunjungan K1 atau kunjungan pertama ibu hamil pada dasarnya satu paket dengan istilah K4 atau kunjungan ke empat ibu hamil. Cakupan atau target K1 dan K4 yang diharapkan berkisar 80-95%. Capaian kunjungan K1 dan K4 pada ibu hamil di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 sangat rendah yaitu 32,00% untuk K1 dan 28,00% untuk K4. Jika dilihat trend perkembangannya terlihat baik capaian K1 dan K4 pada ibu hamil sama-sama mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

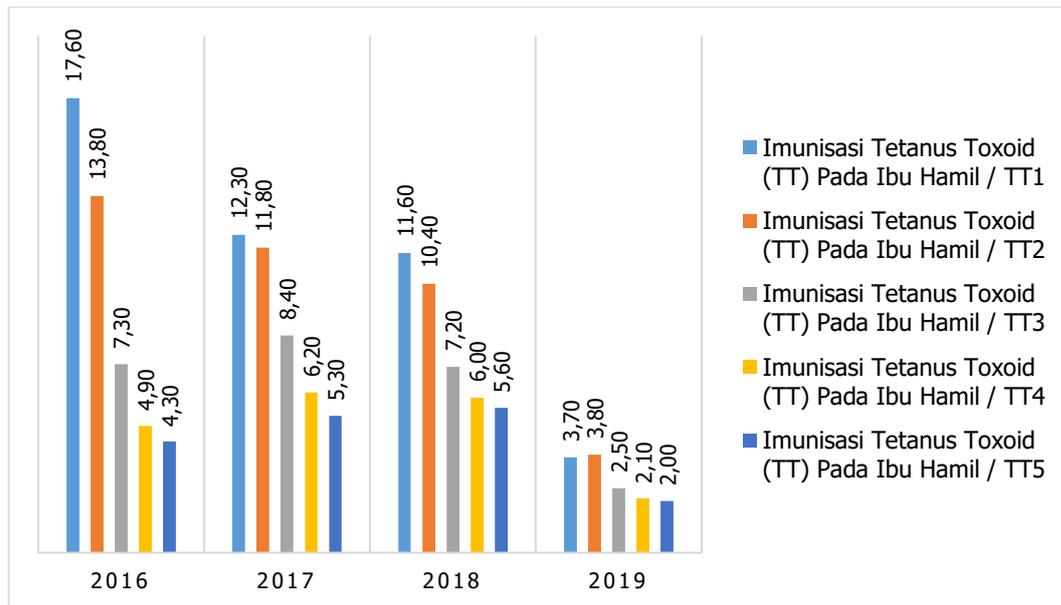


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

Gambar 5. 5 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2019

1.5 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas

Istilah kunjungan K1 atau kunjungan pertama ibu hamil pada dasarnya satu paket dengan istilah K4 atau kunjungan ke empat ibu hamil. Cakupan atau target K1 dan K4 yang diharapkan berkisar 80-95%. Capaian kunjungan K1 dan K4 pada ibu hamil di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 sangat rendah yaitu 32,00% untuk K1 dan 28,00% untuk K4. Jika dilihat trend perkembangannya terlihat baik capaian K1 dan K4 pada ibu hamil sama-sama mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

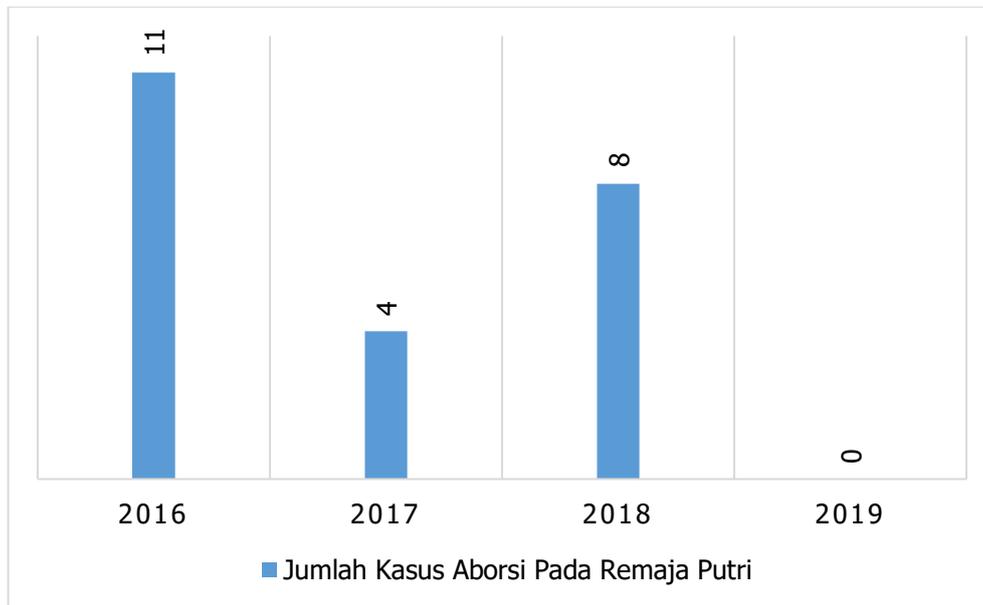


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

Gambar 5. 6 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

1.6 Kasus Aborsi pada Remaja Putri

Berdasarkan survey dan penelitian yang telah dilakukan oleh Worldometer, American Library Association (ALA) melansir bahwa kematian oleh aborsi lebih tinggi dibandingkan dengan penyakit kanker, rokok, alcohol bahkan kecelakaan lalu lintas. Data Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa perkembangan kasus aborsi di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kecenderungan fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2016 mencapai 11 kasus, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 4 kasus, meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 8 dan 0 kasus pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

Gambar 5. 7 Kasus Aborsi pada Remaja Putri di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2019

1.7 Kasus HIV/AIDS

Kasus HIV/AIDS merupakan tantangan yang dihadapi hamper di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Permasalahan HIV/AIDS juga terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah Penderita infeksi HIV/AIDS yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 24 orang pada tahun 2019 yang terdiri dari Penderita HIV/AIDS usia dewasa dan usia anak. Jika dilihat berdasarkan tahunan maka perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat mengalami fluktuasi. Kasus HIV/AIDS tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 62 orang dengan komposisi perempuan yang mendominasi penderita HIV/AIDS sebesar 33 orang penderita dewasa dan 2 orang penderita anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V. 2
Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
<i>Jumlah Penderita HIV/AIDS</i>	44	36	80	126	130	256	70	87	157

Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
<i>Jumlah Penderita HIV/AIDS</i>	69	99	168	100	112	212

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

1.8 Pengguna NAPZA

Peristiwa nikah berdasarkan usia dapat menggambarkan pernikahan usia anak. Berdasarkan data dari Departemen Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, terlihat bahwa pada tahun 2017-2018 masih terdapat kasus pernikahan usia anak. Meskipun mengalami penurunan jumlah perkawinan usia anak di Kabupaten Kutai Kartanegara terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 87 orang pada tahun 2018. Kemudian untuk usia dewasa terlihat jumlah peristiwa perkawinan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai angka di atas 1.000 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel V. 3
Pengguna Napza di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2017-2018

Indikator	Satuan	2017			2018		
		L	P	Agregat	L	P	Agregat
Jumlah Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) YANG DISIDIK	(ORANG)	289	31	320	250	20	270
Jumlah Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) YANG DIREHAB	(ORANG)	261	13	274	245	12	257
Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang DISIDIK	(ORANG)	17	0	17	2	0	2
Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun	(ORANG)	0	0	0	10	0	10

Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang Telah Direhabilitasi							
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

1.9 Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia

Peristiwa nikah berdasarkan usia dapat menggambarkan pernikahan usia anak. Berdasarkan data dari Departemen Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, terlihat bahwa pada tahun 2017-2018 masih terdapat kasus pernikahan usia anak. Meskipun mengalami penurunan jumlah perkawinan usia anak di Kabupaten Kutai Kartanegara terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 87 orang pada tahun 2018. Kemudian untuk usia dewasa terlihat jumlah peristiwa perkawinan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai angka di atas 1.000 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V. 4
Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021

Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia	Tahun 2018			Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia	Tahun 2019		
	L	P	Jumlah		L	P	Jumlah
<i>Usia 13-16 Tahun</i>	3	15	18	<i>Usia 13 – 16 Tahun</i>	-	-	-
<i>Usia 17-20 Tahun</i>	66	219	285	<i>Usia 17 – 18 Tahun</i>	-	-	-
<i>Usia 21-30 Tahun</i>	549	468	1.017	<i>Usia – 19 Tahun</i>	84	61	145
<i>Usia 31-38 Tahun</i>	128	63	191	<i>Usia 19 – 21 Tahun</i>	568	1.697	2.265
<i>Usia 39-45 Tahun</i>	36	32	68	<i>Usia 22 – 30 Tahun</i>	3.654	3.005	6.659
<i>Usia 46-60 tahun</i>	34	19	53	<i>Usia 31 + Tahun</i>	1.339	882	2.221
<i>Total Usia 13-60 Tahun</i>	816	816	1.632	<i>Total Usia 19 -30+ Tahun</i>	5.645	5.645	11.290

Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia	Tahun 2020			Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia	Tahun 2021		
	L	P	Jumlah		L	P	Jumlah
<i>Usia 13 – 16 Tahun</i>	-	-	-	<i>Usia 13 – 16 Tahun</i>	-	-	-
<i>Usia 17 – 18 Tahun</i>	-	-	-	<i>Usia 17 – 18 Tahun</i>	-	-	-
<i>Usia – 19 Tahun</i>	61	190	251	<i>Usia – 19 Tahun</i>	29	93	122
<i>Usia 19 – 21 Tahun</i>	581	1.367	1.948	<i>Usia 19 – 21 Tahun</i>	536	1.131	1.667
<i>Usia 22 – 30 Tahun</i>	3.325	2.774	6.099	<i>Usia 22 – 30 Tahun</i>	3.211	2.796	6.007
<i>Usia 31 + Tahun</i>	1.112	748	1.860	<i>Usia 31 + Tahun</i>	870	626	1.496
<i>Total Usia 19 -30+ Tahun</i>	5.079	5.079	10.158	<i>Total Usia 19 -30+ Tahun</i>	4.646	4.646	9.292

Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia	Tahun 2022		
	L	P	Jumlah
<i>Usia 13 – 16 Tahun</i>	-	-	-
<i>Usia 17 – 18 Tahun</i>	-	-	-

<i>Usia – 19 Tahun</i>	11	56	67
<i>Usia 19 – 21 Tahun</i>	396	945	1.341
<i>Usia 22 – 30 Tahun</i>	2.480	2.101	4.581
<i>Usia 31 + Tahun</i>	680	465	1.145
Total Usia 19 -30+ Tahun	3.567	3.567	7.134

Sumber : Departemen Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

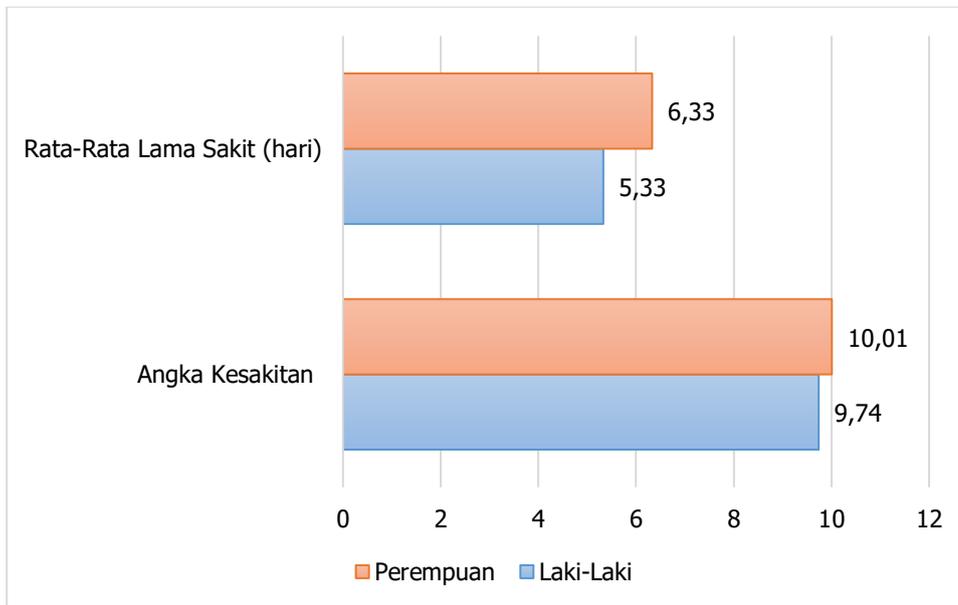
Tabel V. 5
Perkara Dispensasi Nikah di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2017-2022

Bulan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	10	3	6	35	25	11
Pebruari	5	5	5	20	17	11
Maret	7	10	3	22	20	7
April	5	6	12	3	7	12
Mei	5	7	4	3	17	8
Juni	2	2	4	36	28	13
Juli	13	13	10	106	22	7
Agustus	12	7	4	31	8	2
September	9	1	4	14	13	15
Oktober	10	4	6	26	17	7
Nopember	8	10	27	20	12	-
Desember	8	2	12	7	2	-
Jumlah	94	70	97	323	188	93

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

1.10 Status Kesehatan Penduduk

Gambaran status kesehatan dapat diukur melalui presentase angka kesakitan dan rata-rata lama sakit. Angka kesakitan yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata sebesar 9,87 dimana perempuan memiliki angka kesakitan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Angka kesakitan perempuan mencapai 10,01 sedangkan laki-laki 9,74. Sedangkan untuk rata-rata lama sakit di Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih 5 hingga 6 hari (5,81) dimana perempuan rata-rata lebih lama mengalami gangguan kesehatan dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mengalami gangguan kesehatan 6 hari (6,33) sedangkan laki-laki hanya 5 hari (5,33). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Kutai Kartanegara 2019

Gambar 5. 8 Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lama Sakit Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

1.11 Akses ke Pelayanan Kesehatan

Akses ke pelayanan kesehatan pada dasarnya dapat digambarkan dari berbagai aspek diantaranya ketersediaan fasilitas kesehatan, penggunaan jaminan kesehatan serta pelayanan terhadap ibu melahirkan, serta terkait dengan pelayanan imunisasi bayi. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data, telah terdapat enam jenis fasilitas kesehatan yang tersebar pada tiap-tiap kecamatan di Kutai Kartanegara. Hal ini sudah cukup baik mengingat seluruh kecamatan telah memiliki pelayanan kesehatan berupa Puskesmas.

**Tabel V. 6
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021**

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Polindes
01.	Samboja	1	-	3	84	4	-
02.	Muara Jawa	-	-	1	36	6	-
03.	Sanga Sanga	-	-	1	30	2	-
04.	Loa Janan	-	-	3	64	1	-
05.	Loa Kulu	-	-	2	47	1	2

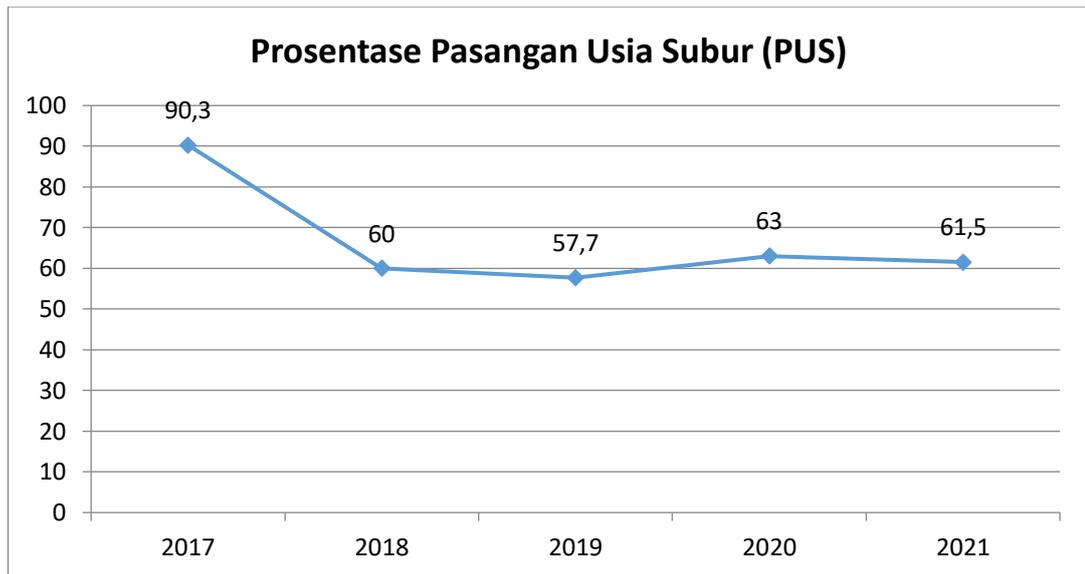
06.	Muara Muntai	-	-	1	30	-	4
07.	Muara Wis	-	-	1	16	-	1
08.	Kota Bangun	1	-	2	59	2	6
09.	Tenggarong	1	-	3	95	7	-
10.	Sebulu	-	-	2	44	-	2
11.	Tgr Seberang	-	-	2	66	5	3
12.	Anggana	-	-	1	26	4	-
13.	Muara Badak	-	-	2	53	6	-
14.	Marangkayu	-	-	2	34	-	-
15.	Muara Kaman	.	-	2	51	3	1
16.	Kenohan	-	-	1	21	-	1
17.	Kb Janggut	-	-	1	17	1	-
18.	Tabang	-	-	2	19	1	4
Jumlah		3	-	32	792	43	24

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara dalam Angka 2022

1.12 Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik ibu maupun anak untuk dapat mewujudkan (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang dapat menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan jalan merencanakan jumlah dan jarak kehamilan melalui alat kontrasepsi. Gambaran kondisi KB yang baik tentunya kemudian dapat mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG).

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang juga menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan perkembangan fluktuatif yang cenderung menurun. Pada tahun 2019 jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif mencapai 57,7 % kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 63 % dan kemudian menurun menjadi 61,5 % pada tahun 2021. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

Gambar 5. 9 Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

BAB VI

PROFIL GENDER DI BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan sangat berkaitan dengan kemampuan baca tulis, pendidikan yang ditamatkan, serta lama sekolah. Pemerintah dalam Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran." Hal tersebut berarti semua warga Negara tidak terkecuali berhak mendapatkan pengajaran. Kesempatan memperoleh pendidikan pada dasarnya harus diberikan pada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan sehingga kemudian dapat tidak hanya meningkatkan kompetensi laki-laki saja. Profil gender di bidang pendidikan kemudian akan menjelaskan mengenai seberapa jauh peran perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengakses pendidikan.

6.1 Status Pendidikan dan Buta Huruf

Kondisi pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara salah satunya dapat dilihat melalui prosentase penduduk 15 tahun ke atas yang buta huruf. Dalam era milenial saat ini seharusnya sudah tidak terdapat lagi penduduk yang tidak dapat membaca. Namun pada kenyataannya masih terdapat 1,15% penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih mengalami buta huruf. Secara lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Kutai Kartanegara 2017

Gambar 6. 1 Prosentase Penduduk 15 Tahun ke Atas dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Status pendidikan merupakan hal yang perlu ditinjau untuk dapat mengetahui kualitas pendidikan ya terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data terlihat bahwa jumlah penduduk 5 tahun ke atas yang tidak lagi bersekolah menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 67,66% (68,77% laki-laki dan 66,42% perempuan). Kemudian penduduk yang masih bersekolah sebanyak 27,6% dan yang tidak/belum bersekolah sebanyak 4,75% (3,64% laki-laki dan 5,98% perempuan). Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

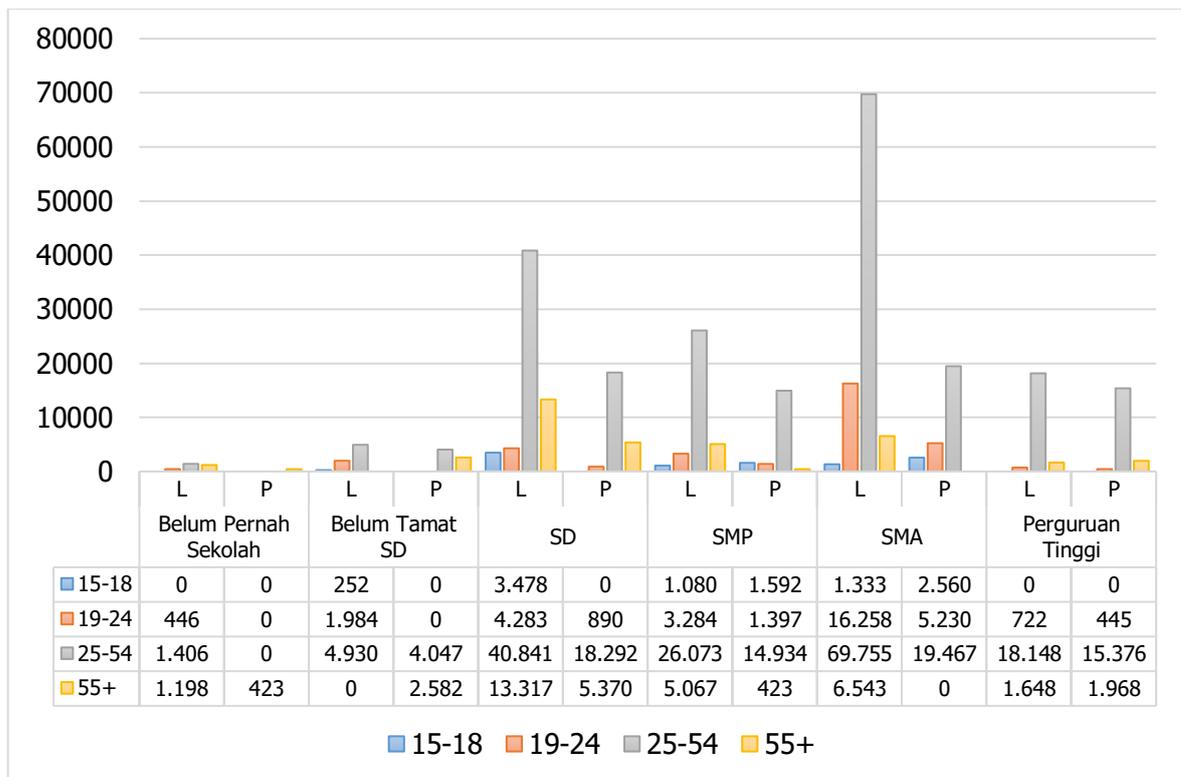
Tabel VI. 1
Prosentase Penduduk Berumur 5 Tahun menurut Status Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Jenis Kelamin	Tidak/belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah lagi
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	
Laki-Laki	3,64	12,25	7,02	8,32	68,77
Perempuan	5,98	12,65	5,42	9,54	66,42
Rata-Rata	4,75	12,44	6,26	8,9	67,66

Sumber : Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Kutai Kartanegara 2017

6.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang turut memberikan kontribusi terhadap kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang telah didapat oleh seseorang tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas dirinya. Jenis pendidikan SMA merupakan jenis pendidikan yang mayoritas telah dienyam oleh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dimana sebanyak 121.146 jiwa merupakan lulusan SMA. Namun, perlu dilihat kembali bahwa jumlah penduduk perempuan (27.257 jiwa) yang mendapatkan pendidikan SMA lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki (93.889 jiwa). Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan SMA saja akan tetapi juga terjadi di jenjang SD, SMP maupun Perguruan Tinggi.



Sumber : Buku Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2018

Gambar 6. 2 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

6.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi yang terdapat dalam dunia pendidikan pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jenjang dalam APS dibagi menjadi tiga kategori yaitu usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun, dan usia 16-18 tahun. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik karena angkanya telah mencapai lebih dari 80%. Meski demikian jika dilihat berdasarkan gender, maka terlihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki khususnya pada jenjang usia 16-18 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VI. 2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2014-2018

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	2014			2015		
	Laki-Laki	Perempuan	Agregat	Laki-Laki	Perempuan	Agregat
APS Usia 7-12 Tahun	99,62	99,99	99,81	100	100	100
APS Usia 13-15 Tahun	99,99	97,93	99,09	100	97,09	98,51
APS Usia 16-18 Tahun	81,26	72,33	76,74	67,68	83,42	73,89
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	2016			2017		
	Laki-Laki	Perempuan	Agregat	Laki-Laki	Perempuan	Agregat
APS Usia 7-12 Tahun	100	99,69	99,85	100	100	100
APS Usia 13-15 Tahun	98,99	98,01	98,44	100	100	100
APS Usia 16-18 Tahun	85,14	81,84	83,6	82,43	79,61	81,01
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	2018					
	Laki-Laki	Perempuan	Agregat			
APS Usia 7-12 Tahun	99,66	N/A	99,83			
APS Usia 13-15 Tahun	N/A	N/A	N/A			
APS Usia 16-18 Tahun	74,31	86,48	80,46			

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

6.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni atau yang disingkat APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Jenjang dalam APM dibagi menjadi tiga kategori yang sesuai dengan jenjang pendidikan seperti SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMA sederajat menunjukkan capaian yang masih kurang optimal karena belum mencapai angka 80%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VI. 3
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018

Angka Partisipasi Murni (APM)	2014			2015		
	Laki-Laki	Perempuan	Agregat	Laki-Laki	Perempuan	Agregat
APM SD sederajat	98,63	98,94	98,41	100	98,85	99,47
APM SMP sederajat	86,57	80,5	90,64	78,96	74,91	76,89
APM SMA sederajat	62,44	62,19	78,07	53,44	68,05	59,2
Angka Partisipasi Murni (APM)	2016			2017		
	Laki-Laki	Perempuan	Agregat	Laki-Laki	Perempuan	Agregat
APM SD sederajat	97,25	95,36	96,34	91,58	93,02	92,27
APM SMP sederajat	85,68	79,75	82,39	78,24	76,78	77,54
APM SMA sederajat	78,91	68,02	73,83	62,77	63,55	63,15
Angka Partisipasi Murni (APM)	2018					
	Laki-Laki	Perempuan	Agregat			
APM SD sederajat	97,37	94,48	95,9			
APM SMP sederajat	91,81	79,52	86,18			
APM SMA sederajat	66,89	81,29	74,17			

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

6.5 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar atau yang disingkat APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jenjang dalam APK dibagi menjadi tiga kategori yang sesuai dengan jenjang pendidikan seperti SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Capaian Angka Partisipasi Murni (APK) di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup baik. Hal tersebut karena capaiannya telah mencapai angka lebih dari 80% meskipun demikian masih terlihat adanya ketimpangan partisipasi kasar antara laki-laki dan perempuan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VI. 4
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018

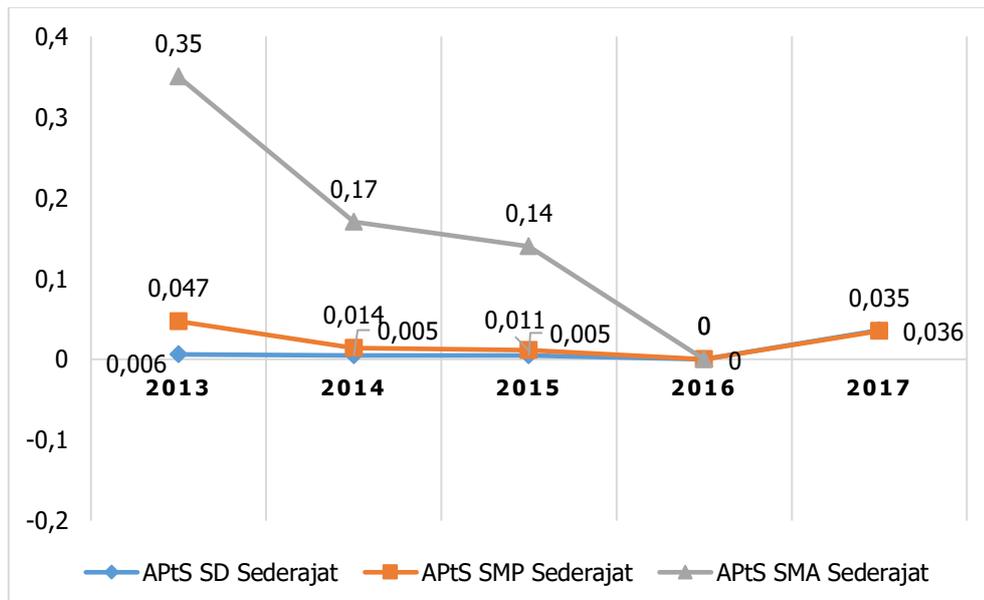
Angka Partisipasi Kasar (APK)	2014			2015		
	Laki-Laki	Perempuan	Agregat	Laki-Laki	Perempuan	Agregat
APK SD sederajat	116,74	111,46	114,13	N/A	N/A	117,58
APK SMP sederajat	98,1	87,5	93,43	N/A	N/A	92,58
APK SMA sederajat	75,87	74,22	75,04	N/A	N/A	84,4
Angka Partisipasi Kasar (APK)	2016			2017		
	Laki-Laki	Perempuan	Agregat	Laki-Laki	Perempuan	Agregat
APK SD sederajat	N/A	N/A	114,34	109,57	102,2	105,9

APK SMP sederajat	N/A	N/A	97,48	104,61	90,8	98,47
APK SMA sederajat	N/A	N/A	96,69	101,28	103,95	102,63
Angka Partisipasi Kasar (APK)	2018					
	Laki-Laki	Perempuan	Agregat			
APK SD sederajat	109,77	102,02	105,93			
APK SMP sederajat	101,16	98,20	99,80			
APK SMA sederajat	87,67	101,39	94,60			

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

6.6 Angka Putus Sekolah (APTs)

Kondisi pembangunan pendidikan dapat diketahui melalui beberapa indikator pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang menggambarkan output adalah Angka Putus Sekolah (APTs). Capaian Angka Putus Sekolah (APTs) diukur berdasarkan jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Capaian APTs di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 capaiannya cukup baik yaitu mencapai 0% pada semua jenjang pendidikan, namun pada tahun 2017 kembali meningkat. Meskipun demikian angka APTs di Kabupaten Kutai Kartanegara selalu di bawah 0,1%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

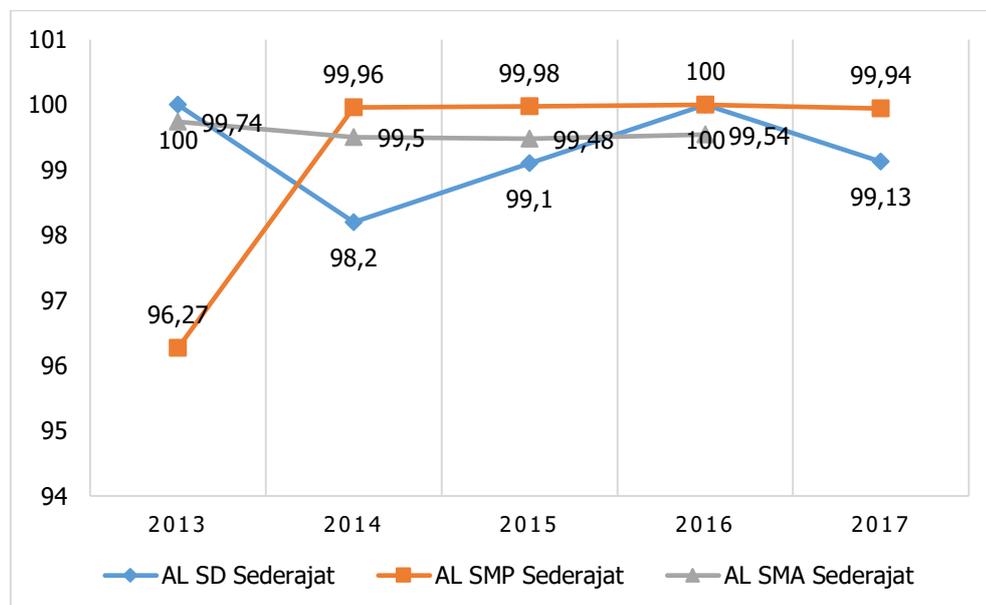


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

Gambar 6.3 Angka Putus Sekolah (APTs) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017

6.7 Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan atau sering disingkat AL juga merupakan salah satu indikator output yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan pendidikan. Capaian Angka Kelulusan (AL) dapat diukur sesuai dengan jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Capaian Angka Kelulusan (AL) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 capaiannya cukup baik yaitu mencapai 100% pada jenjang SD maupun SMP, sedangkan untuk jenjang SMA mencapai 99,54%. Kemudian pada tahun 2017 sedikit menurun menjadi 99,13% untuk Angka Kelulusan (AL) pada jenjang SD, sedangkan pada jenjang SMP mencapai 99,94%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



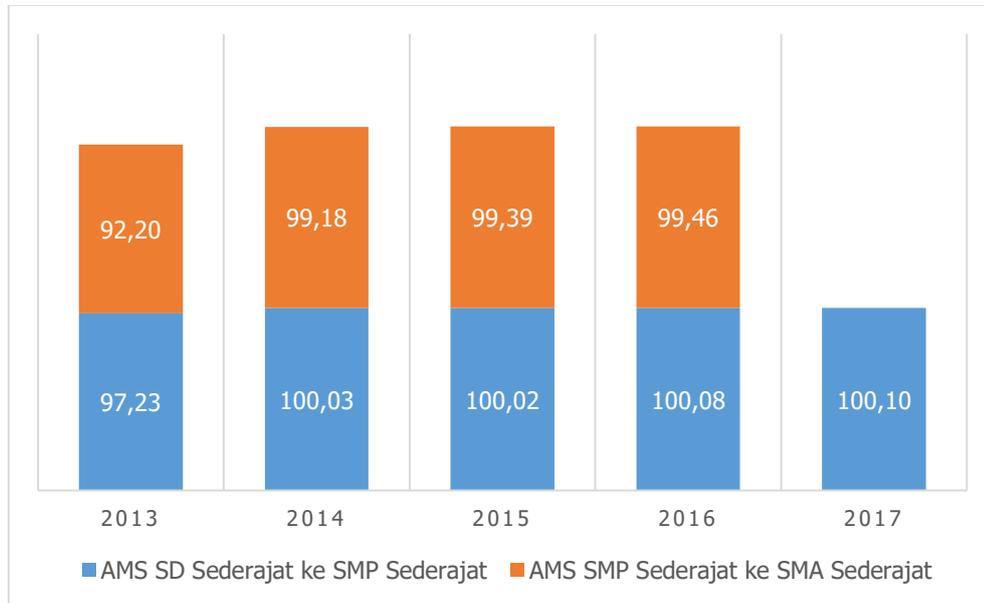
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

**Gambar 6. 4 Angka Kelulusan (AL)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017**

6.8 Angka Melanjutkan Sekolah (AMS)

Angka Melanjutkan Sekolah (AMS) merupakan angka yang menggambarkan proporsi anak sekolah yang melanjutkan pendidikan pada jenjang tertentu. Capaian Angka Melanjutkan Sekolah (AMS) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan yang baik karena mencapai lebih dari 90%. Capaian Angka Melanjutkan Sekolah (AMS) pada jenjang SD

ke SMP mencapai 100,10% pada tahun 2017. Kemudian untuk Angka Melanjutkan Sekolah (AMS) pada jenjang SMP dan SMA mencapai 99,46% pada tahun 2016. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

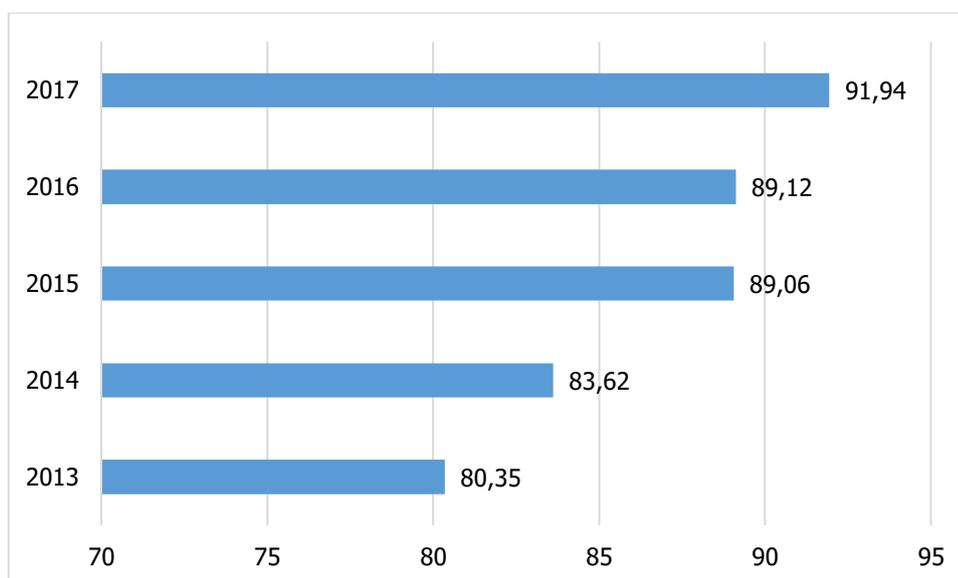


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

Gambar 6. 5 Angka Melanjutkan Sekolah (AMS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017

6.9 Tenaga Kependidikan

Kualitas dari pembangunan pendidikan di suatu wilayah tentu saja tidak hanya dipengaruhi oleh partisipasi sekolah dari masyarakat, akan tetapi juga ketersediaan tenaga kependidikan yang turut menuntun siswa untuk dapat memperoleh pendidikan yang terbaik. Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Kutai Kartanegara terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 80,35% kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 91,94%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

Gambar 6. 6 Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017

6.10 Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan dibagi menjadi tiga yaitu Paket A, Paket B, dan Paket C. Jumlah peserta pendidikan kesetaraan di kabupaten Kutai Kartanegara pada dua tahun terakhir (2016-2017) menunjukkan adanya penurunan pada setiap jenjang. Sedangkan untuk persentase siswa yang tidak lulus pendidikan kesetaraan pada dua tahun terakhir (2016-2017) menunjukkan adanya peningkatan yang cukup tinggi baik pada jenjang Paket A, Paket B, maupun Paket C. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel VI. 5
Pendidikan Kesetaraan
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018**

Pendidikan Kesetaraan	Satuan	2014	2015	2016	2017
Jumlah Peserta Paket A	(ORANG)	20	40	51	74
Jumlah Peserta Paket B	(ORANG)	-	-	343	208
Jumlah Peserta Paket C	(ORANG)	144	605	698	468
Persentase Siswa Tidak Lulus Paket A	(%)	100	0,99	0,96	1,83
Persentase Siswa Tidak Lulus Paket B	(%)	-	-	0,76	4,5
Persentase Siswa Tidak Lulus Paket C	(%)	0,99	0,99	0,72	8,79

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

6.11 Rata-Rata Lama Sekolah

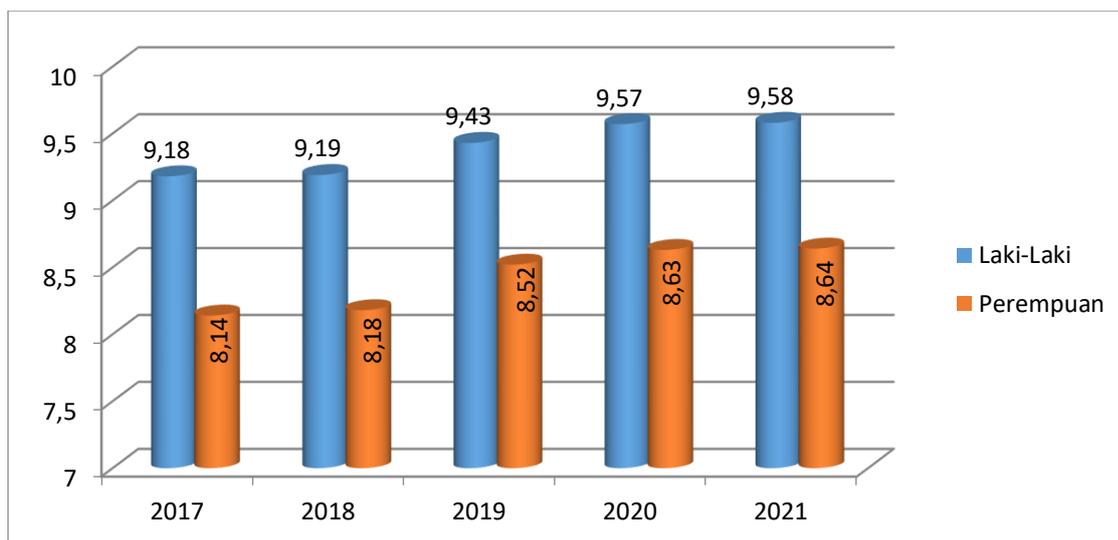
Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 9,10 tahun dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 9,23 tahun. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Kalimantan Timur yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada Table berikut.

Kabupaten / Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	8,20	8,22	8,54	8,55	8,79
Kutai Barat	8,06	8,07	8,34	8,47	8,70
Kutai Kartanegara	8,83	8,84	9,10	9,22	9,23
Kutai Timur	9,06	9,08	9,18	9,19	9,43
Berau	8,96	8,98	9,25	9,52	9,53
Penajam Paser Utara	7,95	8,03	8,16	8,28	8,36
Mahakam Ulu	7,68	7,69	7,89	7,97	8,18
Balikpapan	10,55	10,65	10,67	10,68	10,91
Samarinda	10,34	10,46	10,47	10,48	10,49
Bontang	10,70	10,72	10,73	10,79	10,80
Kalimantan Timur	9,36	9,48	9,70	9,77	9,84

Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 6. 7 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Jika dilihat dari perspektif gender maka dapat diketahui bahwa rata-rata lama sekolah perempuan di Kutai Kartanegara lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah laki-laki mencapai 9,58 tahun sedangkan perempuan hanya mencapai 8,64 tahun.



Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 6. 8 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

6.12 Harapan Lama Sekolah

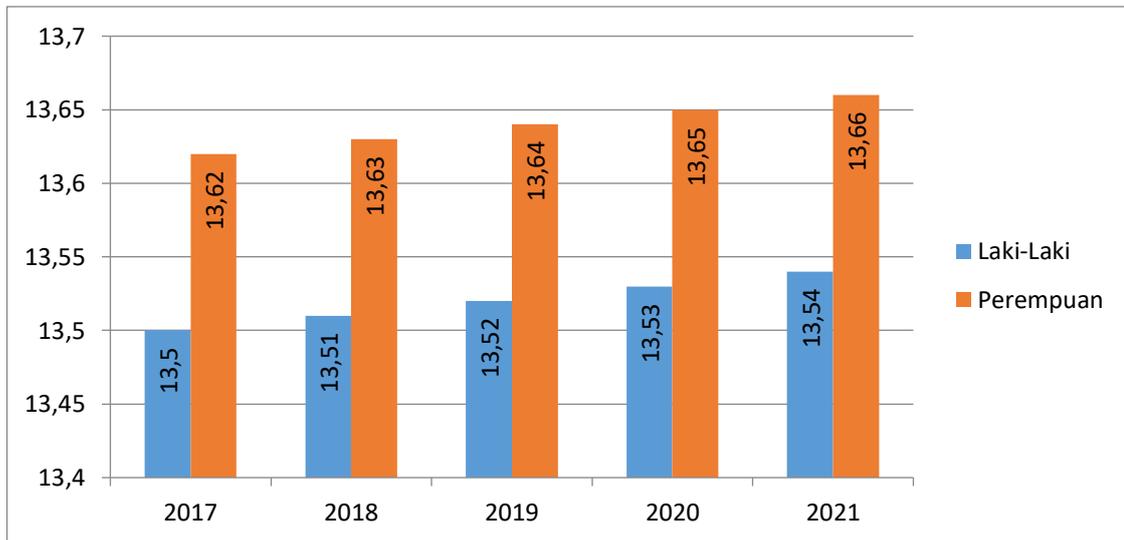
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 13,58 tahun dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 13,60 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur, secara rinci dapat dilihat pada Table berikut.

Kabupaten / Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	12,98	12,99	13,00	13,10	13,25
Kutai Barat	12,82	12,88	12,89	12,90	13,02
Kutai Kartanegara	13,56	13,57	13,58	13,59	13,60
Kutai Timur	12,48	12,65	12,78	12,89	12,90
Berau	13,29	13,30	13,31	13,32	13,33
Penajam Paser Utara	12,53	12,54	12,55	12,56	12,57
Mahakam Ulu	12,47	12,48	12,50	12,51	12,61
Balikpapan	13,75	14,12	14,13	14,14	14,22
Samarinda	14,64	14,66	14,70	14,89	15,09
Bontang	12,88	12,89	12,90	13,03	13,17
Kalimantan Timur	13,49	13,67	13,69	13,72	13,81

Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 6. 9 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Jika dilihat dari perspektif gender maka dapat diketahui bahwa harapan lama sekolah perempuan di Kutai Kartanegara lebih Tinggi Perempuan dari laki-laki. Pada tahun 2021 harapan lama sekolah laki-laki mencapai 13,54 tahun dan perempuan mencapai 13,66 tahun.



Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 6. 10 Perkembangan Harapan Lama Sekolah berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

BAB VII

PROFIL GENDER DI BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ketenagakerjaan sering dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu aspek yang dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan juga dapat memberikan gambaran mengenai perekonomian rumah tangga serta pembangunan di suatu wilayah. Profil gender di bidang ketenagakerjaan kemudian akan menjelaskan mengenai seberapa jauh peran perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terlibat di lapangan kerja dan aktif dalam kegiatan perekonomian.

7.1 Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja

Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang mnganggur atau disebut juga pengangguran. Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara terus menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar 355.317 jiwa kemudian menjadi 359.345 jiwa pada tahun 2021. Meskipun demikian, masih terlihat adanya ketimpangan dimana jumlah penduduk laki-laki yang bekerja terlihat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang bekerja. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Table berikut.

Kelompok Umur Pekerja	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin					
	Tahun 2019			Tahun 2021		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15-19	31.130	23.549	54.679	2.020	2.020	2.020
20-24	109.188	69.158	178.386	24.714	21.774	46.488
25-29	146.195	76.837	223.032	91.998	64.801	156.799
30-34	160.693	71.348	232.041	128.454	77.691	206.145
35-39	158.793	76.488	235.281	139.859	74.070	213.929
40-44	146.787	73.654	220.441	142.575	68.298	210.873
45-49	127.806	67.961	195.767	140.975	75.967	216.942

50-54	101.989	52.881	154.870	134.148	66.261	200.409
55-59	71.299	31.006	102.305	117.466	63.093	180.559
60 +	75.848	32.198	108.046	84.596	44.573	129.169

Sumber : BPS Nasional, 2021

Table 7. 1 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2021

Kemudian berdasarkan tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 340.338 jiwa dimana laki-laki mendominasi yaitu sebesar 236.155 jiwa dan perempuan sebesar 104.183 jiwa. Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga masih cukup tinggi yaitu sebesar 118.620 jiwa. Sedangkan perempuan yang bekerja hanya mencapai 94.996 jiwa. Berikut merupakan gambaran jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Tabel VII. 1
Prosentase Penduduk Berumur 5 Tahun menurut Status Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017**

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	236.155	104.183	340.338
Bekerja	225.869	94.996	320.865
Pengangguran	10.286	9.187	19.473
Bukan Angkatan Kerja	50.748	149.572	200.320
Sekolah	31.357	25.178	56.535
Mengurus Rumah Tangga	11.399	118.620	130.019
Lainnya	7.992	5.774	13.766
Jumlah	286.903	253.755	540.658

Sumber : Buku Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2018

Jika dilihat berdasarkan sektor pekerjaan, maka terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja di sektor formal dengan capaian sebesar 320.865 jiwa. Selain itu, pekerja di sektor pertanian juga cukup tinggi dimana jumlahnya mencapai 102.735 jiwa. Secara lebih rinci mengenai jumlah pekerja berdasarkan sektor pekerjaan yang ditekuni di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018.

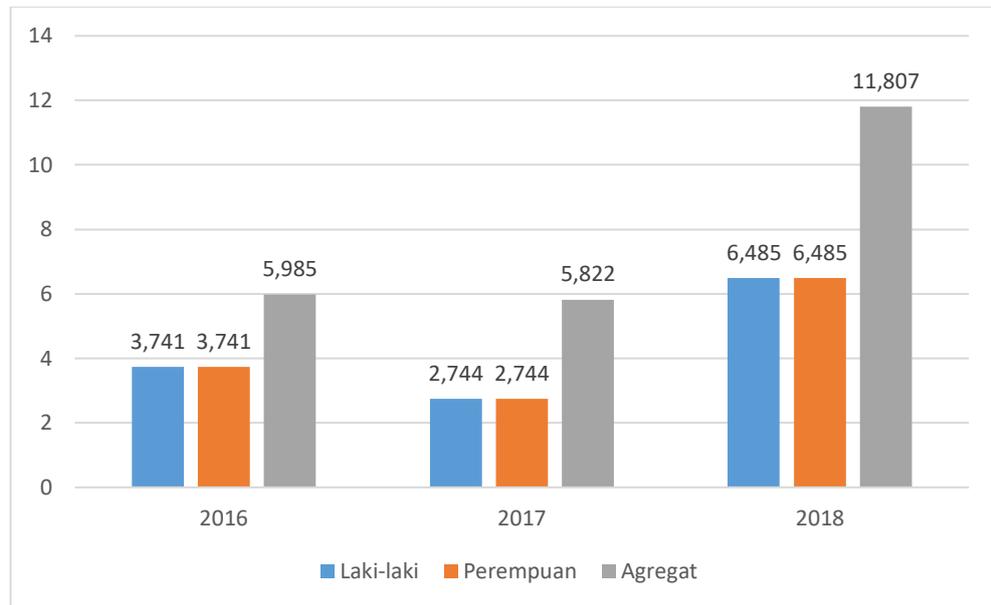
**Tabel VII. 2
Jumlah Pekerja berdasarkan Sektor Pekerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018**

Urusan dan Indikator	Tahun 2018		
	Laki-Laki	Perempuan	Agregat
Jumlah Pekerja di Sektor Formal	225.869	94.996	320.865
Jumlah Pekerja di Sektor Pertanian	80.375	22.360	102.735
Jumlah Pekerja di Sektor Pertambangan/Penggalian	42.623	1.151	43.774
Jumlah Pekerja di Sektor Industri	8.412	6.773	15.185
Jumlah Pekerja di Sektor Listrik, Gas dan Air	1.731	359	2.090
Jumlah Pekerja di Sektor Bangunan	10.341	423	10.764
Jumlah Pekerja di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	33.720	38.744	72.464
Jumlah Pekerja di Sektor Transportasi/Komunikasi	8.647	1.321	9.968
Jumlah Pekerja di Sektor Keuangan	5.202	1.711	6.913
Jumlah Pekerja di Sektor Jasa-jasa	34.818	22.154	56.972

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

7.2 Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan tenaga kerja yang masih dalam kategori usia anak (6 hingga 18 tahun). Istilah pekerja anak memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka. Jumlah pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 5.985 pada tahun 2016 kemudian menjadi 11.807 pada tahun 2018. Jika dilihat berdasarkan gender maka jumlah pekerja anak laki-laki seimbang dengan jumlah pekerja anak perempuan. Keduanya memiliki angka yang cukup tinggi. Sehingga melihat permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu lebih memperhatikan terkait penanganan pekerja anak. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

Gambar 7. 2 Perkembangan TPAK berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2018

7.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun 2019 sebesar 65,74% kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 61,98% dan naik pada tahun 2021 menjadi 64,46%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Table berikut.

Kabupaten / Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	62,15	66,84	66,17	67,88	65,34
Kutai Barat	66,01	71,33	66,76	71,02	72,53
Kutai Kartanegara	62,95	64,14	65,74	61,98	64,46
Kutai Timur	66,75	68,95	68,85	68,96	67,97
Berau	66,00	67,48	66,49	67,40	65,55
Penajam Paser Utara	61,00	64,53	64,33	69,04	66,85
Mahakam Ulu	77,12	79,02	69,91	76,22	74,83
Balikpapan	63,38	63,51	65,44	62,90	64,29
Samarinda	63,05	60,82	64,77	65,16	66,29
Bontang	64,52	64,72	68,06	69,24	66,63
Kalimantan Timur	63,75	64,55	65,96	65,50	65,49

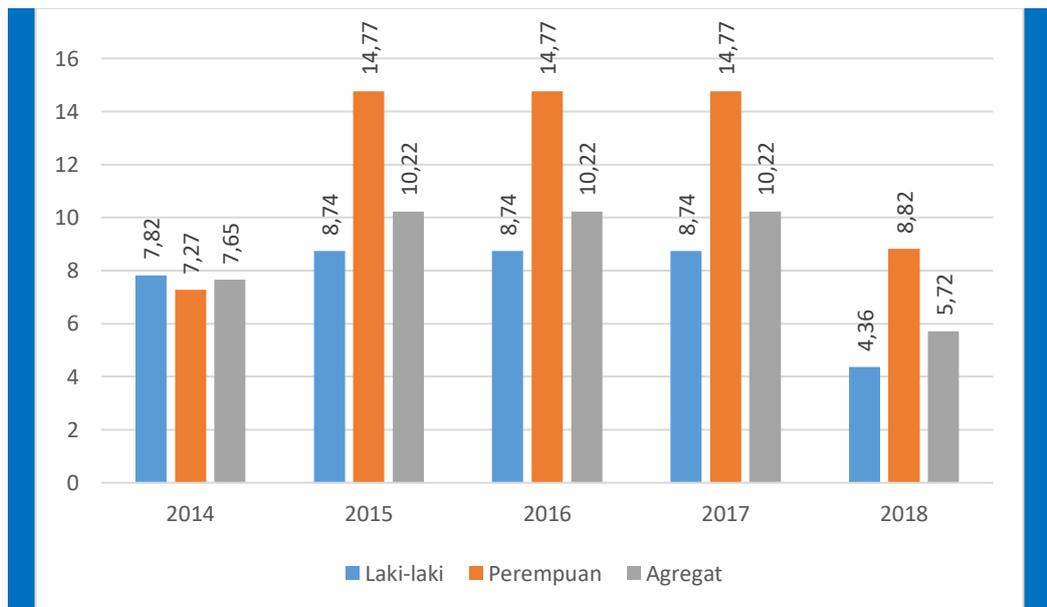
Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 7. 3 Perkembangan TPAK Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2017-2021

7.4 Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan TPT Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 ke tahun 2018 mengalami fluktuasi, pada tahun 2013 sebesar 7,65% meningkat menjadi sebesar 10,22% pada tahun 2015 dan turun pada tahun 2018 menjadi 5,72%. Hal ini cukup baik, dimana penurunan TPT mengindikasikan berkurangnya pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika dilihat dari perspektif gender maka dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka perempuan di Kutai Kartanegara masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

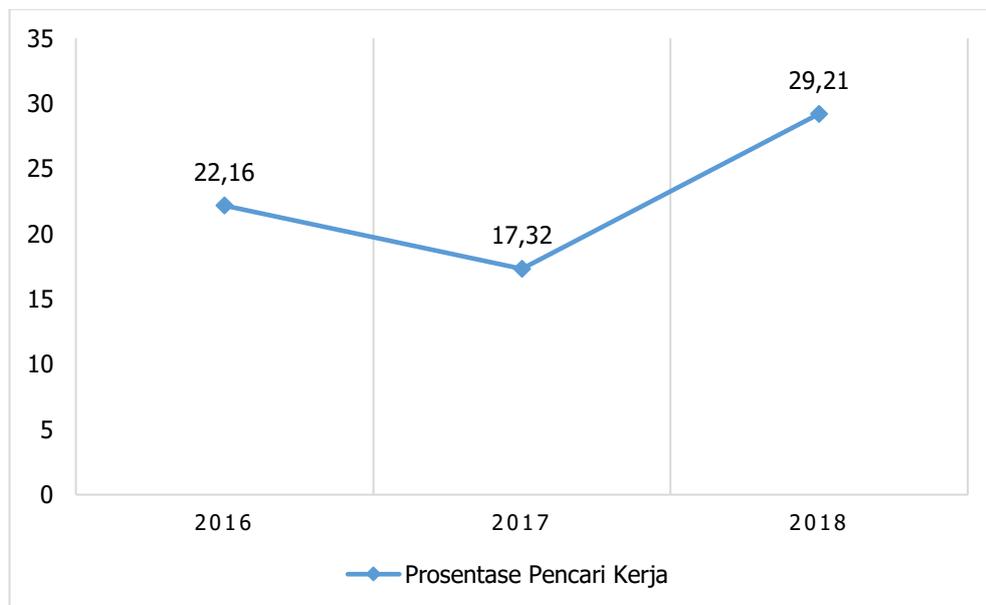


Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

Gambar 7. 4 Perkembangan TPT berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018

7.5 Pencari Kerja

Prosentase pencari kerja yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini mencapai 29,21%. Angka tersebut merupakan yang tertinggi diantara tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 22,16% pada tahun 2016 dan 17,32% pada tahun 2018. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

Gambar 7. 5 Prosentase Pencari Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2018

Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, maka jumlah pencari kerja paling banyak berasal dari pendidikan SMA Sederajat. Selanjutnya jumlah pencari kerja tertinggi berasal pula dari lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah sebanyak 1421 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ketimpangan sangat terlihat pada seluruh jenjang pendidikan, dimana perempuan memiliki partisipasi dalam pekerjaan. Jumlah pengangguran yang selalu meningkat setiap tahunnya juga menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan wilayah kedepannya. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.

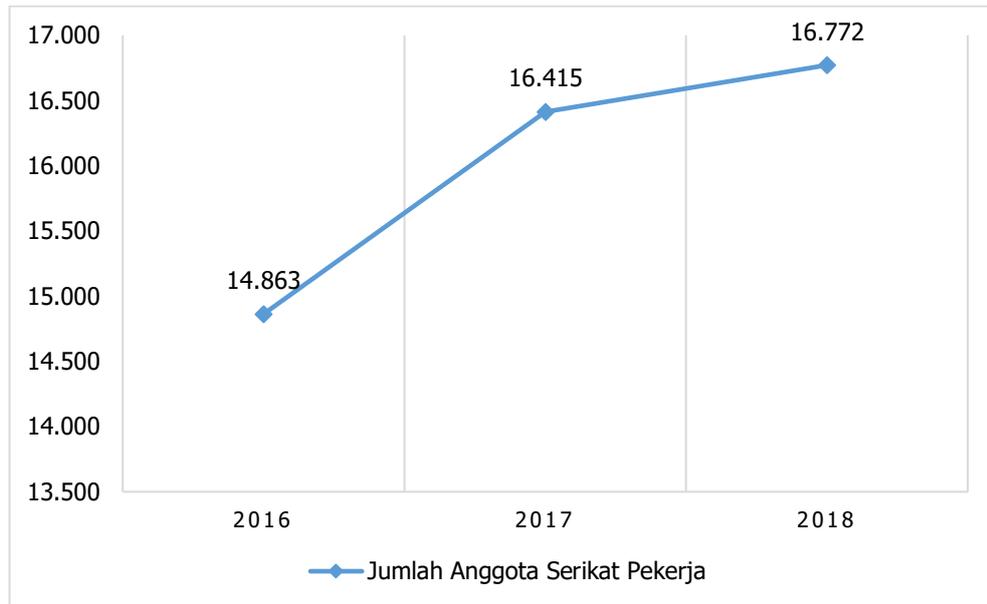
Tabel VII. 3
Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2018

Indikator	2016			2017			2018		
	Laki-Laki	Perempuan	Agregat	Laki-Laki	Perempuan	Agregat	Laki-Laki	Perempuan	Agregat
Jumlah Pencari Kerja	3090	1702	4792	3506	1592	5098	4425	1929	6354
Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SD Sederajat	257	38	295	221	21	242	241	27	268
Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMP Sederajat	373	84	457	292	81	373	307	66	373
Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMA Sederajat	1917	967	2884	2446	947	3393	2868	931	3799
Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan Diploma	281	306	587	162	211	373	211	282	493
Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan S1/S2/S3	262	307	569	385	332	717	798	623	1421

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

7.6 Serikat Pekerja

Serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jumlah anggota dari serikat pekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2018 telah mencapai 16.772 pekerja, jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Harapan dari bertambahnya anggota serikat pekerja maka juga akan berimbas pada kesejahteraan pekerja yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara lebih rinci mengenai jumlah anggota serikat pekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar berikut ini.

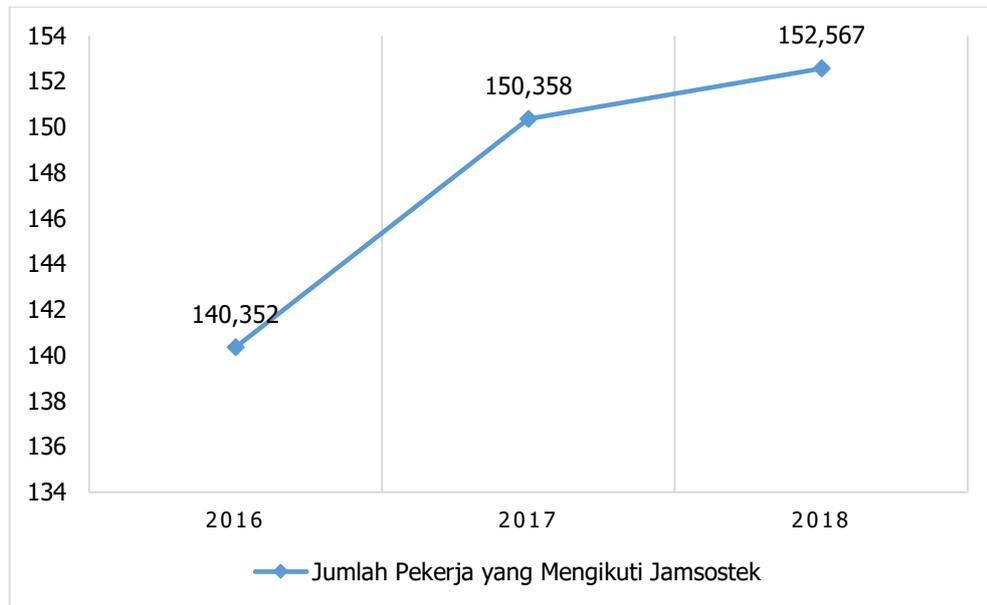


Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

Gambar 7. 6 Jumlah Anggota Serikat Pekerja di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2018

7.7 Pekerja Peserta Jamsostek (K3)

Jamsostek merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja, bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial maupun ekonomi. Pekerja yang menjadi peserta Jamsostek di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2018 terus menunjukkan peningkatan menjadi 152.567 jiwa. Secara lebih rinci mengenai jumlah pekerja yang menjadi anggota Jamsostek (K3) di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar berikut ini.

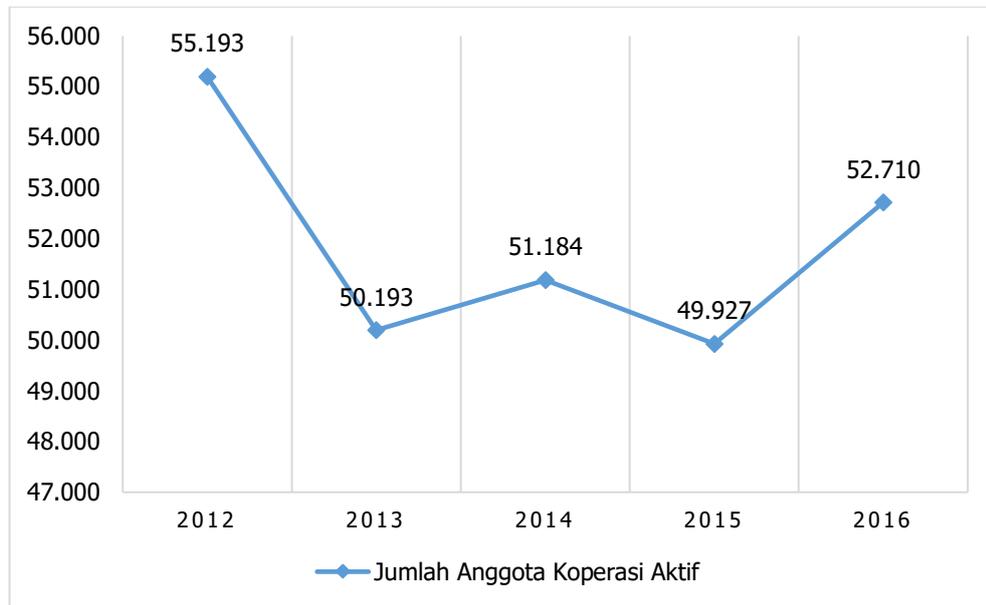


Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

Gambar 7. 7 Jumlah Pekerja yang Mengikuti Jamsostek (K3) Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2018

7.8 Koperasi dan Pelaku Usaha

Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Kegiatan dalam koperasi selalu berlandaskan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jumlah anggota koperasi aktif yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2012 mencapai 55.193 anggota kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 49.927 anggota dan kembali meningkat menjadi 52.710 anggota pada tahun 2017. Secara lebih rinci mengenai jumlah anggota koperasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

Gambar 7. 8 Jumlah Anggota Koperasi Aktif di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2016

Dewasa ini, pelaku usaha merupakan salah satu pekerjaan yang paling diminati oleh masyarakat. Dengan menjadi pelaku usaha, maka setiap wirausaha tersebut akan membuka lapangan pekerjaan. Meskipun demikian, jumlah pelaku usaha yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2017 ke tahun 2018 tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung menurun drastis dari sebelumnya sebesar 174 menjadi 49 pelaku usaha. Secara lebih rinci mengenai jumlah anggota koperasi dapat dilihat pada gambar berikut.

**Tabel VII. 4
Jumlah Pelaku Usaha
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018**

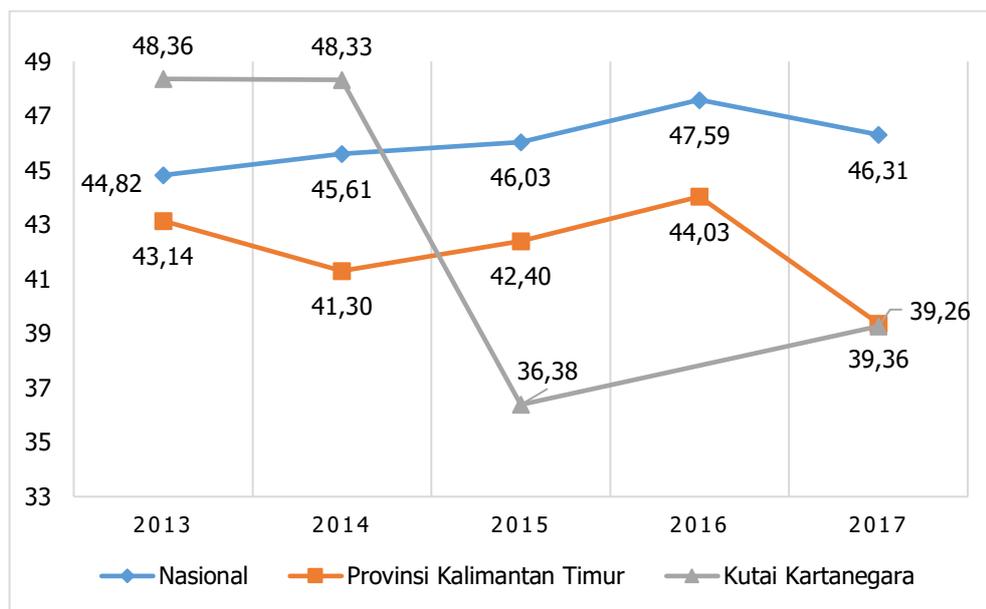
Indikator	2017			2018		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	AGREGAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	AGREGAT
Jumlah Pelaku Usaha	75	99	174	16	33	49

Sumber : BPS Nasional, 2018

7.9 Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial

Pekerjaan profesional dan manajerial merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus. Pekerja profesional dan

manajerial tentunya tidak hanya memiliki keahlian tetapi juga pendidikan yang mumpuni. Perempuan yang dapat menjadi pekerja profesional dan manajerial tentunya menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pengukur indeks pemberdayaan perempuan. Berdasarkan data, perempuan yang menjadi pekerja profesional dan manajerial pada tahun 2013 hingga 2017 mengalami prosentase yang fluktuatif. Pada tahun 2013 prosentasenya mencapai 48,36% kemudian terus turun hingga pada tahun 2015 menjadi 36,38% dan tahun 2017 kembali naik menjadi 39,26%.



Sumber : BPS Nasional, 2018

Gambar 7. 9 Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2013-2017

BAB VIII

PROFIL GENDER DI BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bidang politik dan pengambilan keputusan merupakan bidang yang turut berpengaruh terhadap kesetaraan dan pembangunan. Menanggapi hal tersebut, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengaturustamaan Gender (PUG) merupakan indikator bahwa isu gender belum mendapatkan perhatian khusus di bidang pembangunan, hingga Pemerintah Pusat merasa perlu menetapkan suatu pijakan politis yang dapat membuka peluang bagi perempuan Indonesia untuk dapat berpartisipasi aktif di dalam pembangunan termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender. Profil gender di bidang politik kemudian akan menjelaskan mengenai seberapa jauh peran perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terlibat di lapangan kerja dan aktif dalam kegiatan politik dan pengambilan keputusan.

8.1 Partisipasi di Bidang Politik

Perempuan di Indonesia saat ini terus menunjukkan perannya dalam pembangunan maupun bidang politik. Hal tersebut juga turut didukung dengan adanya kuota perempuan sekurang-kurangnya 30 persen untuk dapat mengajukan diri menjadi calon legislatif.



Sumber : KPU Kutai Kartanegara, 2018

Gambar 8. 1 Jumlah Anggota DPRD di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

Berdasarkan data KPU Kutai Kartanegara, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kutai Kartanegara saat ini adalah 45 orang yang terdiri dari 41 orang anggota legislatif laki-laki dan 4 sisanya adalah anggota legislatif perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik sebagai anggota legislatif lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian, jika dilihat berdasarkan kepengurusan pada partai juga terlihat bahwa laki-laki masih mendominasi dalam kepengurusan di dalam partai. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

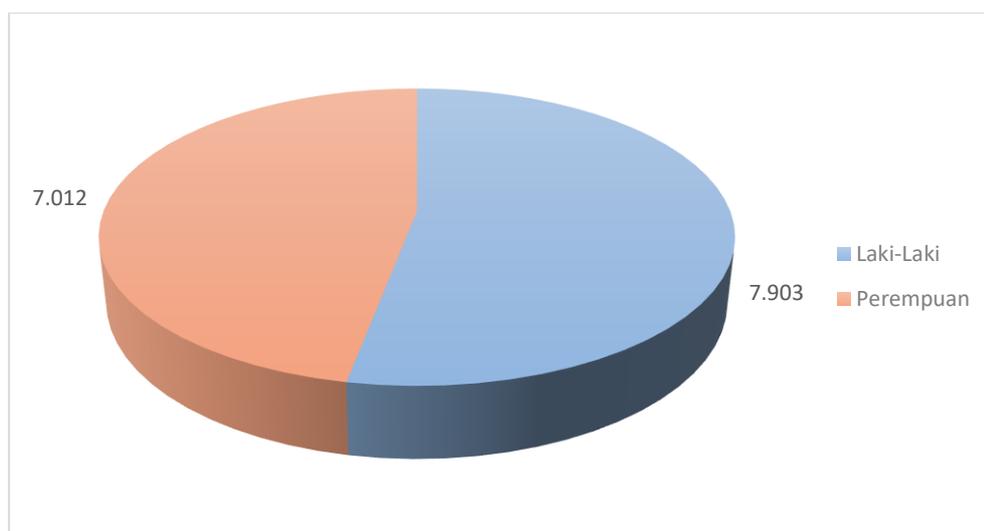
Tabel VIII. 1
Jumlah Pengurus Harian Partai di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

Jumlah Pengurus Harian Partai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PKS	4	0	4
PAN	5	1	6
PDIP	6	0	6
PKB	4	0	4
GOLKAR	18	3	21

Sumber : KPU Kutai Kartanegara, 2018

8.2 Partisipasi di Bidang Eksekutif

Berdasarkan data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Buku Kutai Kartanegara dalam Angka 2018, dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017 mencapai 14.915 jiwa dengan proporsi laki-laki sebanyak 7.903 jiwa dan perempuan 7.012 jiwa. Jika dilihat maka jumlah perempuan yang menjadi Pegawai Negeri Sipil masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki.



Sumber : Buku Kutai Kartanegara dalam Angka 2018

Gambar 8. 2 Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Kemudian, jika dilihat berdasarkan pendidikan yang ditamatkan maka rata-rata PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara berpendidikan S1 (Sarjana). Jika dilihat PNS berdasarkan pendidikan S1 (Sarjana) ataupun Diploma lebih didominasi oleh perempuan. Sedangkan pada PNS dengan pendidikan terakhir S2 maupun S3 lebih didominasi jumlahnya oleh penduduk laki-laki.

Tabel VIII. 2 Jumlah PNS menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
S3>	7	-	7
S2	351	152	503
S1	2763	2887	5650
D-IV	54	30	84
D-III	270	537	807
D-II	534	704	1238
D-I	160	183	343
SLTA	3435	2441	5876
SLTP	224	63	287
SD	105	15	120
Jumlah	7.903	7.012	14.915

Sumber : Buku Kutai Kartanegara dalam Angka 2018

Selanjutnya, partisipasi perempuan dalam eksekutif juga dilihat berdasarkan struktur organisasi atau dalam jabatan struktural PNS yang biasa disebut dengan eselon. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Eselon atau tingkatan jabatan struktural tertinggi yaitu Eselon I hingga yang terendah adalah Eselon IV. PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar menempati non eselon, sedangkan untuk struktur jabatan terbanyak terdapat di eselon IV yang terdiri dari kepala sub bagian dan kepala seksi yang sebagian besar merupakan laki-laki. Sedangkan pada struktur jabatan tertinggi yaitu eselon II hanya diduduki oleh 3 perempuan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VIII. 3
Jumlah PNS menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Eselon I	-	-	-
Eselon II	32	3	35
Eselon III	179	34	213
Eselon IV	779	293	1.072
Non Eselon	6.913	6.682	13.595
Jumlah	7.903	7.012	14.915

Sumber : Buku Kutai Kartanegara dalam Angka 2018

8.3 Partisipasi di Bidang Yudikatif

Lembaga yudikatif memiliki makna sebagai lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses bertalannya hukum di sebuah wilayah atau negara. Lembaga legislatif ini dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dimana keduanya berperan sebagai pengawas dan pemantau hukum yang terdapat di Indonesia. Aktor yang berperan dalam pengawsan tersebut tentu saja jaksa dan hakim. Berdasarkan data, jumlah jaksa dan hakim dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan. Jika dilihat berdasarkan gender maka terlihat

pula masih terdapat kesenjangan jumlah jaksa/hakim perempuan dan jaksa/hakim laki-laki. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel VIII. 4
Jumlah Jaksa, Pegawai Kejaksaan, Hakim dan Jumlah Panitia Pengganti
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Urusan dan Indikator	2018			2019		
	Laki-Laki	Perempuan	Agregat	Laki-Laki	Perempuan	Agregat
Jumlah Jaksa	10	2	12	11	2	13
Jumlah Pegawai Kejaksaan	20	8	28	23	8	31
Jumlah Hakim	6	3	9	8	3	11
Jumlah Panitia Pengganti	6	4	10	6	5	11

Sumber : Mahkamah Agung (MA) Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019

BAB IX

PROFIL GENDER DI BIDANG SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk melindungi seluruh masyarakat sekaligus juga menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah serta berkelanjutan. Pemberdayaan secara hukum dan sosial diperlukan untuk dapat memperbaiki penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

9.1 Program Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki empat jenis program penyelenggaraan sosial, diantaranya Raskin/Rastra atau sering disebut dengan Beras untuk Rakyat Miskin dimana penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan prosentase penerima sejumlah 8,38% RT. Kemudian terdapat pula Program Indonesia Pintar (PIP) dengan prosentase penerima 2,75% RT. Selanjutnya, Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan jumlah penerima sebanyak 5,69% RT dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima 1,2% RT. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IX. 1
Prosentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Jenis Program Sosial	Prosentase Rumah Tangga yang Menerima
Raskin/Rastra	8,38
Program Indonesia Pintar (PIP)	2,75
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	5,69
Program Keluarga Harapan (PKH)	1,2

Sumber : Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Kutai Kartanegara 2017

9.2 Jaminan Sosial

Selain program perlindungan sosial, terdapat pula program jaminan sosial yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki lima jenis program penyelenggaraan sosial, diantaranya jaminan pensiun/veteran yang diterima oleh 3,67% RT, kemudian jaminan hari tua sebesar 2,21% RT, kemudian asuransi kecelakaan kerja sebanyak 7,3% RT, jaminan/asuransi kematian sebanyak 1,41% RT serta pesangon pemutusan hubungan kerja sebanyak 4,06% RT. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

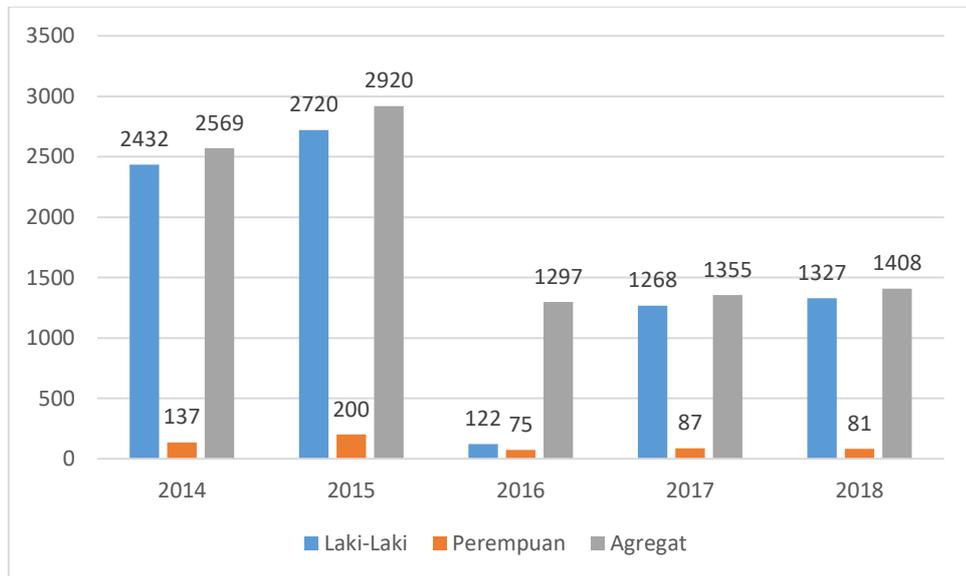
Tabel IX. 2
Prosentase Rumah Tangga menurut Jenis Jaminan Sosial yang Diterima di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Jenis Jaminan Sosial	Prosentase RT yang Memiliki/Menerima Jaminan Sosial
Jaminan Pensiun/Veteran	3,67
Jaminan Hari Tua	2,21
Asuransi Kecelakaan Kerja	7,3
Jaminan/Asuransi Kematian	1,41
Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja	4,06

Sumber : Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Kutai Kartanegara 2017

9.3 Penguhi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Jumlah penghuni Lapas tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia dan tingkat kriminalitas/keamanan yang terdapat di suatu wilayah. Jumlah penghuni Lapas di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan yang fluktuasi cenderung menurun. Pada tahun 2014 mencapai 2.569 jiwa. Kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 2.920 jiwa. Selanjutnya terus menurun pada tahun 2018 menjadi 1.408 jiwa. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Kutai Kartanegara 2017

Gambar 9. 1 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kaupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2014-2018

BAB X

PROFIL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap perbuatan yang berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin dapat berakibat bagi kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk pula ancaman (Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB Tahun 1993). Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk dari ketidakadilan gender. Berdasarkan data pada Polres Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Kutai Kartanegara dalam Angka Tahun 2018, disebutkan terdapat beberapa jenis kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Kekerasan tersebut diantaranya pemerkosaan, perlindungan anak, KDRT, penganiayaan dan *trafficking*. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi adalah penganiayaan yaitu sejumlah 62 kasus lepas dan 55 kasus di sel. Kemudian kekerasan anak juga sering terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu hingga mencapai 44 kasus lepas dan 37 kasus sel. Selanjutnya KDRT yang mencapai 18 kasus lepas dan 17 kasus sel. Berikut merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017.

Tabel X. 1
Jenis Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Jenis Kekerasan	Lepas	Sel
Pemerkosaan	3	3
Kekerasan Fisik Terhadap Anak	44	37
KDRT	18	17
Penganiayaan	62	55
Trafficking	1	0

Sumber : Buku Kutai Kartanegara dalam Angka 2018

BAB XI

PROFIL TUMBUH KEMBANG ANAK

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tumbuh kembang anak merupakan hal yang sangat penting untuk dapat membentuk karakter yang baik bagi penerus bangsa. Berbagai faktor turut mempengaruhi tumbuh kembang anak diantaranya seperti faktor genetik, lingkungan, dan perilaku merupakan modal dasar dalam proses tumbuh kembang anak. Profil tumbuh kembang anak Kabupaten Kutai Kartanegara mencoba melihat secara garis besar mengenai aksesibilitas pendidikan bagi anak di Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendukung pembangunan wilayahnya.

11.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk dapat membangun karakter dan kepribadian. Usia dini merupakan pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan usia dini pada dasarnya diberikan ke anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usiadini yang tercatat dalam BPS adalah pendidikan merupakan Taman Kanak-Kanak. Terdapat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara, jumlah keseluruhannya mencapai 588 unit dengan jumlah murid mencapai 19.232 anak dan jumlah guru mencapai 3.196 orang. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

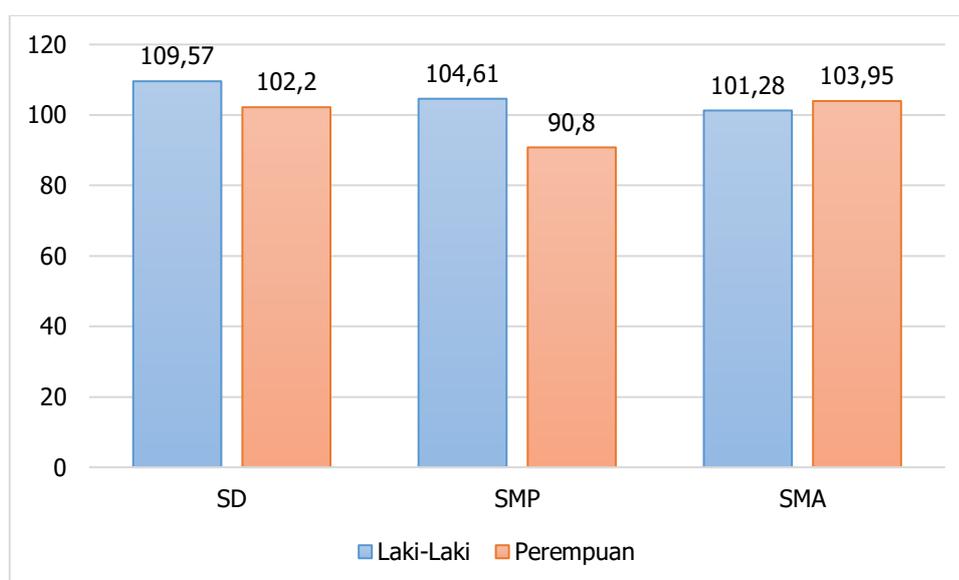
Tabel XI. 1
Jenis Pendidikan, Jumlah Sekolah, Murid dan Guru
Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Jenis Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rata-Rata Murid/Sekolah	Rata-Rata Guru/Sekolah
Taman Kanak-Kanak Negeri	577	19.117	2.228	33	44
Taman Kanak-Kanak Swasta	11	115	968	88	10
Jumlah	588	19232	3196	121	54

Sumber : Buku Kutai Kartanegara dalam Angka 2018

11.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah penduduk menurut jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat usia. Nilai APK dapat menunjukkan prosentase lebih dari seratus persen apabila jumlah murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sebagai contoh anak bersekolah di SD/ sederajat berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APK yang akan di bahas disini adalah APK SD, SMP, dan SMA baik formal maupun non formal.



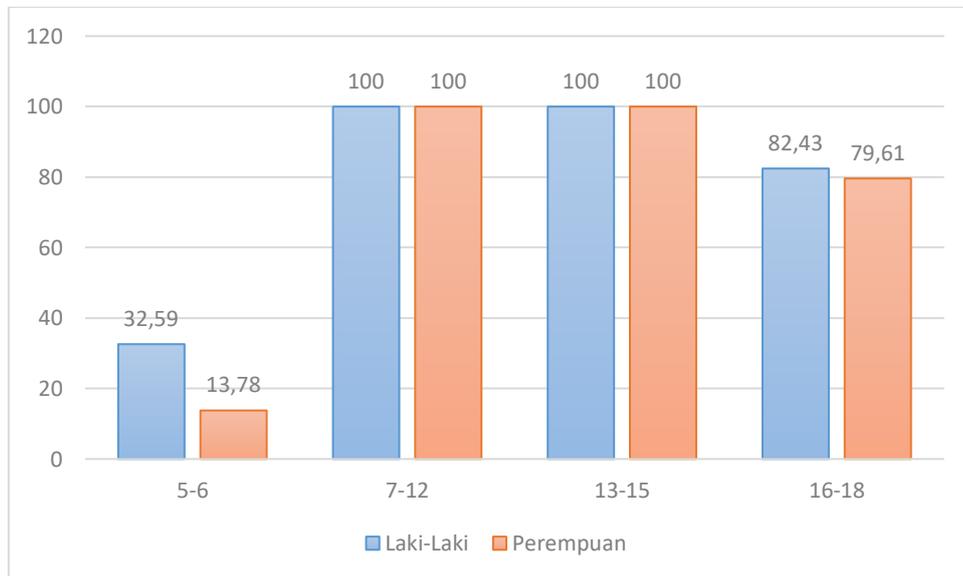
Sumber : Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Kutai Kartanegara 2017

Gambar 11. 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas maka terlihat bahwa APK SD, SMP maupun SMA di atas 100%. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD, SMP, maupun SMA lebih banyak dari jumlah penduduk sesuai usianya. Kemudian, jika dilihat dalam perspektif gender maka diketahui bahwa untuk tingkat SD dan SMP sedikit lebih tinggi APK laki-laki dibanding perempuan, sedangkan pada tingkat SMA polanya berbalik, dimana APK perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

11.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di definisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS biasanya digunakan untuk mengetahui banyaknya jumlah anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah.



Sumber : Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Kutai Kartanegara 2017

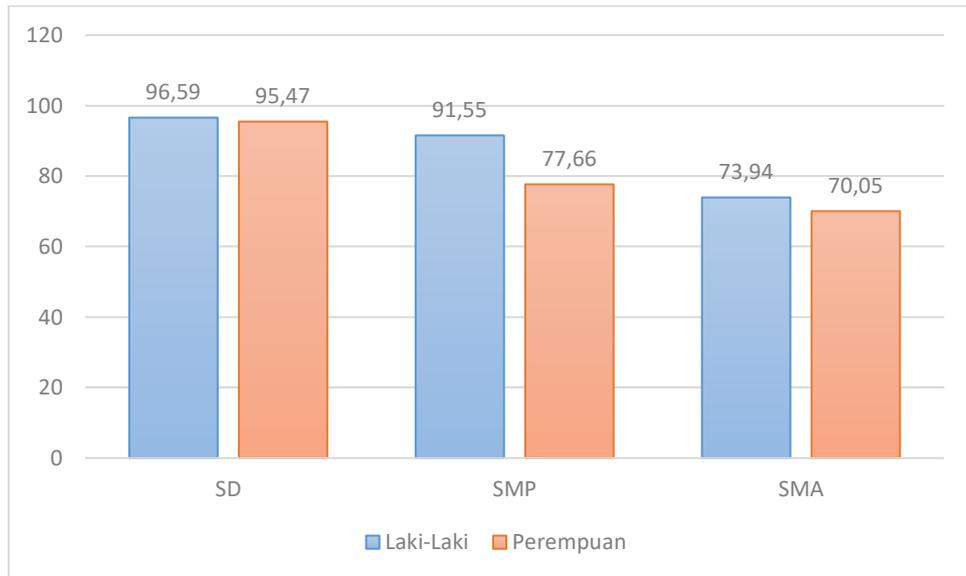
Gambar 11. 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada penduduk perempuan usia 5-6 tahun memiliki tingkat partisipasi sekolah yang rendah. Sedangkan untuk usia 7-12 dan 13-15 partisipasi perempuan maupun laki-laki sama-sama tinggi dan seimbang yaitu 100%. Namun pada usia 16-18 partisipasi perempuan kembali rendah yaitu mencapai 79,61%.

11.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) di definisikan sebagai proporsi jumlah anak kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengetahui penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM SD adalah proporsi jumlah murid

SD/sederajat yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh anak usia 7-12 tahun begitu pula pada jenjang-jenjang lainnya.



Sumber : Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Kutai Kartanegara 2017

Gambar 11. 3 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

Nilai APM pada gambar di atas menunjukkan bahwa adanya ketimpangan, dimana pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA penduduk perempuan lebih rendah partisipasinya dibanding dengan laki-laki.

BAB XII

PENUTUP

12.1 Kesimpulan

1. Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara belum sepenuhnya dapat menyediakan data gender dan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangan dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Data terpisah gender dan anak merupakan data pembuka wawasan elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan untuk menghasilkan Statistik Gender yang mengandung isu gender termasuk didalamnya isu anak atau biasa disebut dengan analisis gender.

12.1 Rekomendasi

1. Penguatan Forum Data Gender dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Optimalisasi peran perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kabupaten Kutai Kartanegara guna penyediaan data gender dan anak sesuai dengan kewenangan urusan pembangunan masing-masing yang mendasari Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pengganti Permendagri No. 98 Tahun 2018 tentang tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

3. Pengembangan data gender dan anak Kabupaten Kutai Kartanegara yang disesuaikan prinsip Satu Data Indonesia dalam amanat Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.